

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN  
TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN  
DESA DIGITAL MELALUI PROGRAM *SMART VILLAGE*  
(STUDI DI DESA SUMBER ARUM KOTABUMI KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NANDA ARINI SUCI  
1946021017**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN  
TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN  
DESA DIGITAL MELALUI PROGRAM *SMART VILLAGE*  
(STUDI DI DESA SUMBER ARUM KOTABUMI KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA)**

**Oleh**

**NANDA ARINI SUCI  
1946021017**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN DESA DIGITAL MELALUI PROGRAM *SMART VILLAGE* (STUDI DI DESA SUMBER ARUM KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Oleh

NANDA ARINI SUCI

Desa yang seharusnya menjadi prioritas utama dan mendapat perhatian khusus dalam konteks pembangunan nasional, tapi hingga saat ini masih banyak terjadi kesenjangan dan ketimpangan. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan program *smart village*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mewujudkan desa digital melalui program *smart village*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan Siagian (2000) serta dianalisis menggunakan pilar *Smart village* dengan indikator *smart government*, *smart economy*, dan *smart people*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung berperan dan berhasil menerapkan konsep *Smart village* di Desa Sumber Arum. Dinas PMDT menunjukkan capaian signifikan dalam indikator *Smart government* melalui inovasi pemerintahan, sistem, prosedur, dan metode kerja, peningkatan kemampuan manajerial, pelopor perubahan desa, dan pelaksanaan kebijakan. Dalam aspek *Smart economy*, Dinas PMDT menjaga stabilitas ekonomi melalui *e-commerce*, mengembangkan ekonomi kreatif, dan mendorong orientasi masa depan desa. Sementara itu, dalam *Smart people*, Dinas PMDT menjaga stabilitas sosial budaya, mendorong teknologi digital, menyusun strategi masa depan yang jelas, dan mendidik masyarakat untuk menerima perubahan.

Kata kunci: *smart village*, peran, desa.

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT AND TRANSMIGRATION OFFICE OF LAMPUNG PROVINCE IN REALIZING DIGITAL VILLAGES THROUGH THE *SMART VILLAGE* PROGRAM (A CASE STUDY OF SUMBER ARUM VILLAGE, KOTABUMI, NORTH LAMPUNG REGENCY)**

**By**

**NANDA ARINI SUCI**

Villages should be a top priority and receive special attention in the context of national development. However, there are still many gaps and inequalities. One of the efforts made by the Lampung Provincial Government to address these issues is the implementation of a smart village program. This study aims to determine and describe the role of the Lampung Province Village Community Empowerment and Transmigration Office in realizing digital villages through the smart village program.

This research employs a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in the study included interviews, observations and documentation. The research applies role theory as proposed by Siagian (2000) and analyzes it using the Smart village pillars, with indicators of smart government, smart economy, and smart people.

The findings indicate that Community Empowerment and Transmigration (PDMT) of Lampung Province plays a significant role and has successfully implemented the Smart Village concept in Sumber Arum Village. The PMDT Office achieved significant results in smart government indicators through innovations in government, systems, procedures, and work methods, improving managerial capabilities, pioneering village change, and implementing policies. In the aspect of smart economy, the PMDT Office maintains economic stability through e-commerce, develops the creative economy, and fosters a forward-looking orientation for the village. Meanwhile, in terms of smart people, the PMDT Office maintains socio-cultural stability, promotes digital technology, formulates a clear future strategy, and educates the community to embrace change.

Keywords: smart village, role, village.

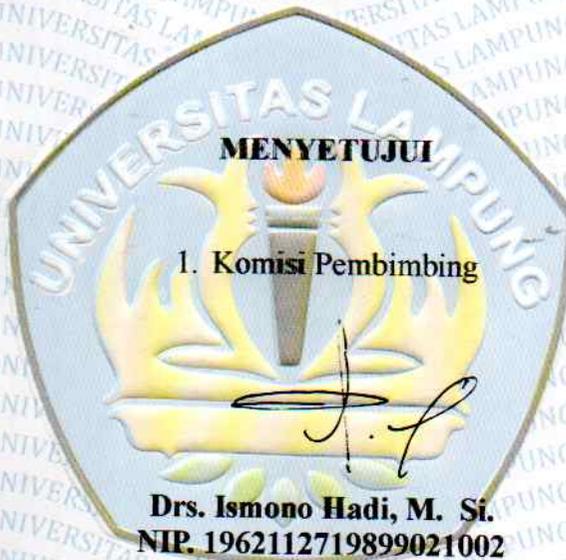
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Desa Digital Melalui Program *Smart village* (Studi di Desa Sumber Arum Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)

Nama Mahasiswa : **Nanda Arini Suci**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1946021017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Drs. Ismono Hadi, M. Si.**  
**NIP. 1962112719899021002**

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**  
**NIP. 196112181989021001**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Drs. Ismono Hadi, M.Si.**



**Anggota : Dr. Feni Rosalia, M.Si**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 197608212000032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Oktober 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.-
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2024  
Yang membuat pernyataan,



Nanda Arini Suci  
NPM. 1946021017

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nanda Arini Suci, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 April 2001 yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Alm. Bapak Supriyatno dan Ibu Suharti.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Islam Bina Balita Bandar Lampung pada tahun 2006-2007, dilanjutkan di SD 2 Al-Azhar Bandar Lampung pada tahun 2006-2013. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 23 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 04 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Paralel dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2019.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri Penulis. Penulis mulanya bergabung pada Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung pada periode 2020/2021.

Pada saat menjadi mahasiswa Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya Penulis ikut serta dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

**(QS. Al-Baqarah: 286)**

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang, kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah maha mengetahui segala sesuatu”

**(QS. At-Taghabun: 11)**

“Setetes keringat Ayah dan Ibu yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

**(Nanda Arini Suci)**

“Teruslah berjalan walaupun dunia sedang tak berpihak padamu, gantungkan harapan dan doa kepada Allah”

**(Nanda Arini Suci)**

## PERSEMBAHAN



*Alhamdulillah* robbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Sungguh perjuangan yang cukup panjang yang telah saya lalui untuk dapat menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang saya impikan dari lama. Rasa syukur dan bahagia ini saya persembahkan kepada orang yang sangat berarti dalam perjalanan saya, karena berkat doa dan dukungan mereka saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini Ku persembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

**Alm. Supriyatno dan Suharti**

Kakak

**Nadia Marintan dan Haris Pramudia, S.Si.**

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Desa Digital Melalui Program *Smart village* (Studi di Desa Sumber Arum Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”**. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Desa Digital Melalui Program *Smart village* (Studi di Desa Sumber Arum Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”** sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
5. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Dosen Penguji, terimakasih Ibu atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.I.P selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terimakasih Bapak atas segala saran, dukungan pada proses penyusunan berkas selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan;
8. Kedua orang tua Penulis, Almarhum Papa Supriyatno yang telah meninggalkan dunia ini setelah Penulis seminar hasil dan belum sempat memberikan jawaban kepada Papa yang selalu bertanya “ Nanda kapan wisuda ?“. Terimakasih Pa, pertanyaan mu akan selalu Penulis perjuangkan, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan sampai akhir hayat mu. Terimakasih telah menjadi pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab atas hidup istri dan anakmu baik secara materi maupun non materi, dan menjadi garda terdepan disaat keadaan apapun. Semoga Almarhum Papa husnul khotimah, diterangkan dan di lapangkan kuburnya, ditempatkan di surga Allah SWT Aamiin. Dan Kepada Mama Suharti Terimakasih atas kasih sayang, doa, dan nasihat yang engkau berikan kepada Alm. Suami atau papa serta anak-anak mu. Terimakasih telah sabar menghadapi segala asam garam kehidupan rumah tangga, terimakasih atas perjuangan seorang ibu membesarkan Penulis sampai saat ini. Semoga kita selalu melibatkan Allah dalam urusan apapun dan dimanapun mama berada, semoga Allah selalu mendengar doa dan perjuangan kita agar lekas diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari setiap hal buruk Aamiin;

9. Kepada Kakak Mba Nadia Marintan beserta Mas Ipar Tito Ari Pratama, A.Md.Kep. dan Mas Haris Pramudia, S.Si. beserta Ayuk Ipar Beby Aprilyani. Terimakasih atas dukungan, nasihat, motivasi, baik secara materi maupun non materi kepada Penulis, terimakasih telah menghadapi kerasnya sifat adik bungsu kalian dengan sabar. Untuk keponakan Penulis, Bagas Pradewa, Nabilla Hasna, Ponakan kembarku Salma Bestari, Salwa Bintari dan calon keponakanku yang masih di dalam rahim saat ini semoga kelak kelahiran mu dan keadaan Ibu mu selalu diberi keselamatan. Doa Penulis untuk kalian semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan masa depan yang terbaik, dan dapat mengangkat derajat orangtua serta bermanfaat bagi orang lain;
10. Kepada Om dan Tanteku, Abidillah, S.Ak., Hadi Suryono, A.Md. T., Moch Soleh, Yuni Kartikasari, Yuli Martinawati, Maria Zahara, A.Md. E.;
11. Kepada Mas Mochammad Rizqi terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, terimakasih telah berkontribusi banyak dalam hal apapun, baik tenaga, waktu, nasihat, maupun materi dan menemani dalam setiap kondisi dengan memberikan ribuan semangat. Semoga perjuangan bersama akan terus berjalan dan hal baik terus menyertai yang akan kita lalui untuk kedepannya;
12. Kepada informan Peneliti, Bapak Saprul Al-Hadi, Bapak Nurman, Bang Fitriyono, Mba Felysia, Bapak Gabriel Bintoro, Mas Wahyu, Bapak Marliadi, Bapak H. Yusuf Nahromi, Mba Nur, Bapak Ngatimin, dan Ibu Kasih;
13. Seluruh komisioner, staf dan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
14. Kepada Sahabat Seperjuangan Penulis dari SMK, Natasya Putri Pratami, Tegar Ramadhani, S.Kom., dan Anggraini Puspitarini, terimakasih telah menjadi sahabat di segala situasi dan kondisi saat senang maupun sedih dan menemani saat Penulisan Skripsi;
15. Kepada Teman Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Widia Nurmalasari, S.IP., Yose, Desy Ari, S.IP., Nanda Sahda, S.IP., Amalisya, S.IP., Ema Anggraini, S.IP., Devi, Gadis Prasta, S.IP., Jessica Syahani, S.IP., Lutfia

Rahma, S.IP., Agnes, S.IP., Fitri., S.IP., terimakasih telah membantu proses penulisan Skripsi ini;

16. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin

Bandar Lampung, 10 Oktober 2024  
Penulis,

Nanda Arini Suci

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Peran .....	13
2.1.1 Pengertian Peran.....	13
2.1.2 Jenis-jenis Peran.....	14
2.1.3 Dimensi Peran .....	14
2.2 Tinjauan Peran Pemerintahan .....	15
2.2.1 Peran Selaku Stabilisator.....	16
2.2.2 Peran Selaku Inovator.....	18
2.2.3 Peran Selaku Modernisator.....	21
2.2.4 Peran Selaku Pelopor.....	30
2.2.5 Peran Selaku Pelaksana Langsung .....	31
2.3 Tinjauan Desa.....	33
2.3.1 Pengertian Desa.....	33
2.3.2 Kedudukan Desa.....	34
2.3.3 Kewenangan Desa .....	34
2.4 Tinjauan <i>Smart village</i> .....	35
2.4.1 Pengertian <i>Smart village</i> .....	35
2.4.2 Pilar Utama <i>Smart village</i> .....	36
2.5 Desa Digital .....	40
2.6 Kerangka Berpikir.....	41
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Lokasi Penelitian.....	45
3.3 Fokus Penelitian.....	46
3.4 Jenis Data .....	48
3.5 Informan Penelitian.....	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	51
3.8 Teknik Analisis Data .....	51

<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>53</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.....	53
4.1.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung .....	53
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung .....	54
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung .....	55
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
5.1 <i>Smart government</i> .....	60
5.1.1 Inovasi Lingkungan Pemerintahan.....	60
5.1.2 Inovasi Sistem, Prosedur dan Metode Kerja .....	64
5.1.3 Kemampuan dan Kemahiran Manajerial.....	68
5.1.4 Pelopor Menuju Perubahan dan Pengembangan Desa .....	77
5.1.5 Pelaksana Langsung Kebijakan.....	81
5.2 <i>Smart economy</i> .....	85
5.2.1 Kemampuan Menjaga Stabilitas Ekonomi.....	85
5.2.2 Kemampuan dan Mengolah Kekayaan Alam yang Dimiliki Sehingga Memiliki Nilai Tambah yang Tinggi .....	88
5.2.3 Orientasi Masa Depan .....	94
5.3 <i>Smart people</i> .....	100
5.3.1 Kemampuan menjaga stabilitas sosial budaya .....	100
5.3.2 Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	105
5.3.3 Memiliki Visi yang Jelas Tentang Masa Depan yang Diinginkan	113
5.3.4 Bersedia Menerima Perubahan.....	117
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>132</b>
6.1 Kesimpulan .....	132
6.2 Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>142</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2024.....	2
2. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera .....	2
3. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung.....	3
4. Status IDM Provinsi Lampung Tahun 2022 .....	4
5. Data Desa <i>Smart village</i> Kotabumi Kabupaten Lampung Utara .....	7
6. Informan Penelitian.....	49
7. Hasil Penelitian Peran Dinas PMDT Provinsi Lampung .....	124

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Data Demografi Penduduk Desa Sumber Arum Berdasarkan Pekerjaan .....	8
2. Kerangka Berpikir.....	44
3. Pelatihan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Konsep <i>Smart village</i> .....	62
4. Tim Digitalisasi <i>Smart village</i> Sumber: Dokumentasi Peneliti (2024).....	66
5. Bimbingan Teknis <i>Smart village</i> .....	71
6. Bimbingan Teknis Bagi Operator <i>Smart village</i> .....	72
7. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Implementasi <i>Smart village</i> .....	72
8. Forum Diskusi.....	79
9. E-commerce Lapak Desa Sumber: sumberarum.id.....	87
10. Lapak Desa.....	90
11. Kunjungan Kerja Dinas Ketahanan Pangan ke KWT Sumber Arum .....	92
12. Sosialisasi Pembuatan Pupuk Organik.....	92
13. Bantuan Hewan Ternak Kambing.....	93
14. Perawatan Hewan Ternak Kambing Bantuan .....	94
15. Perbaikan Akses Jalan.....	96
16. Perbaikan Saluran Air .....	97
17. Website Resmi Desa Sumber Arum Sumber: sumberarum.id .....	106
18. Masyarakat melakukan pelayanan mandiri Sumber: Dokumentasi Peneliti.	107
19. Kunjungan Universitas Binus ke Perpustakaan Digital (PusGita) .....	110
20. Belajar Bersama di Perpustakaan.....	111
21. Pertemuan Rutin.....	115
22. Edukasi Perubahan Digital.....	120

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan desa di Indonesia harus diberikan prioritas utama dan perhatian khusus oleh pemerintah karena beberapa alasan penting. Pertama, karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Kedua, karena sektor ekonomi dan kontribusi ekonomi dari pedesaan menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Ketiga, masyarakat desa adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak kebijakan nasional, terutama dalam aspek ekonomi, politik, dan pembangunan. Mengingat posisi strategis desa dalam kerangka pembangunan nasional, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus dapat merancang secara komprehensif pembangunan desa mulai dari pengaturan regulasi, perencanaan kebijakan, alokasi anggaran, hingga perencanaan program-program yang diperlukan (Trimurni et al., 2023:1).

Selama ini pembangunan cenderung berorientasi dan bias kota. Sumber daya yang ada di desa diambil sehingga menimbulkan arus urbanisasi dari desa ke kota. Hal tersebut memicu kemiskinan dan keterbelakangan, hal inilah yang kemudian menciptakan ketimpangan desa-kota. Pemerintah idealnya mau dan memampukan desa, bahwa desa dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan. (Huda et al., 2020:540).

Tabel 1. 1 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2024

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	7,68	10,05	8,87	2,17	3,38	5,55
Jawa	7,22	11,32	8,48	7,80	5,44	13,24
Bali dan Nusa Tenggara	7,98	17,23	12,72	0,62	1,40	2,02
Kalimantan	4,27	6,61	5,44	0,37	0,57	0,94
Sulawesi	5,87	12,40	9,59	0,51	1,45	1,96
Maluku dan Papua	6,16	26,23	19,39	0,16	1,35	1,51
<b>Indonesia</b>	<b>7,09</b>	<b>11,79</b>	<b>9,03</b>	<b>11,64</b>	<b>13,58</b>	<b>25,22</b>

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024b)

Berdasarkan data yang dihimpun di atas, dapat diketahui bahwa penduduk yang tergolong miskin di Indonesia lebih banyak berasal dari pedesaan. Persentase penduduk miskin dari perkotaan sebesar 7,09% sedangkan dari pedesaan sebesar 11,79%. Jika dilihat dari banyaknya, jumlah penduduk miskin dari perkotaan sebanyak 11,64 juta orang, sedangkan dari pedesaan sebanyak 13,58 juta orang. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 19,39 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,44 persen. Namun demikian, dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (13,24 juta orang) sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,94 juta orang) (Badan Pusat Statistik, 2024b:4).

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (ribu)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
Aceh	190,55	613,98	804,53
Sumatera Utara	697,46	530,55	1.228,01
Sumatera Barat	139,12	206,62	345,73
Riau	200,91	291,34	492,25
Jambi	118,39	147,03	265,42
Sumatera Selatan	342,34	641,90	984,24
Bengkulu	94,67	186,69	281,36
Lampung	244,04	697,19	941,23
Kepulauan Bangka Belitung	30,40	39,55	69,95
Kepulauan Riau	112,28	26,03	138,30

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024b)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 1.228,01 ribu orang, sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Provinsi di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk miskin terendah yaitu sebanyak 69,95 ribu orang. Daerah-daerah di pulau Sumatera harus mampu menekan angkat kemiskinan ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di perdesaan.

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		
	2022	2023	2024
Lampung Barat	36.20	34.73	33.43
Tanggamus	67.43	65.18	64.22
Lampung Selatan	136.21	133.67	132.38
Lampung Timur	149.12	148.26	142.69
Lampung Tengah	143.34	140.29	137.41
Lampung Utara	114.67	107.21	105.91
Way Kanan	54.28	51.26	48.88
Tulang Bawang	39.19	37.83	37.46
Pesawaran	63.17	59.29	55.01
Pringsewu	38.18	37.60	34.42
Mesuji	13.88	13.71	12.91
Tulang Bawang Barat	20.72	20.32	20.35
Pesisir Barat	21.85	21.45	20.21
Bandar Lampung	90.51	87.08	83.88
Metro	13.68	12.80	12.07
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>1002.41</b>	<b>970.67</b>	<b>941.23</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Menurut data di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 masih tergolong banyak, meskipun setiap tahunnya ada penurunan namun belum terlalu signifikan. Terdapat empat Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin yang sangat banyak di Provinsi Lampung dimana jumlahnya berbanding jauh dengan Kota/Kabupaten lainnya. Daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak nomor satu pada tahun 2024 adalah Kabupaten Lampung Timur yaitu sebanyak 142,69 ribu jiwa. Daerah terbanyak kedua adalah Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebanyak 137, 41 ribu jiwa. Daerah terbanyak ketiga adalah Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebanyak 132,28 ribu jiwa. Daerah terbanyak keempat adalah Kabupaten Lampung Utara

yaitu sebanyak 105,91 ribu jiwa. Sedangkan Kota dan Kabupaten lainnya memiliki jumlah penduduk miskin di bawah 84 ribu jiwa. Perbandingan yang jauh ini menandakan bahwa empat Kabupaten tersebut harus lebih ekstra untuk menekan jumlah penduduk miskin didaerahnya.

Tabel 1. 4 Status IDM Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Status IDM				
				Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Lampung Selatan	17	256	0	1	165	90	0
2	Lampung Tengah	28	301	0	0	138	147	16
3	Lampung Utara	23	232	0	2	194	36	0
4	Lampung Barat	15	131	0	0	21	63	47
5	Tulang Bawang	15	147	0	3	107	33	4
6	Tanggams	20	299	0	3	220	76	0
7	Lampung Timur	24	264	0	4	160	96	4
8	Way Kanan	15	221	0	2	155	54	10
9	Pesawaran	11	144	0	0	103	31	10
10	Pringsewu	9	126	0	0	32	82	12
11	Mesuji	7	105	0	9	51	45	0
12	Tulang Bawang Barat	9	93	0	0	64	28	1
13	Pesisir Barat	11	116	0	14	79	22	1
<b>Jumlah</b>		<b>204</b>	<b>2435</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>1489</b>	<b>803</b>	<b>105</b>

Sumber: (Dinas PMDT Provinsi Lampung, 2022)

Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung tahun 2022 total 2.435 Desa dengan desa mandiri 105 desa, desa maju 803 desa, desa berkembang 1489 desa, desa tertinggal 38 desa, desa sangat tertinggal 0 desa. Dengan menggunakan ukuran Indeks Desa Membangun (IDM), saat ini jumlah desa mandiri mencapai 105 desa atau 4,3% dari 2.435 desa se- Provinsi Lampung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desa-desa di Provinsi Lampung masih sangat perlu untuk pendampingan dan dorongan pengembangan desa.

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa salah satu daerah di Provinsi Lampung yang hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dan harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah adalah Kabupaten Lampung Utara. Salah satu permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara adalah minimnya pendidikan masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara hanya memiliki rata-rata pendidikan hingga kelas 2 tingkat sekolah menengah pertama, yang artinya bahwa implementasi program wajib belajar sembilan tahun belum terlaksana dengan sempurna (Badan Pusat Statistik, 2024a:22).

Permasalahan keterbelakangan lain yang timbul Kabupaten Lampung Utara adalah sulitnya akses air bersih. Ditemukan bahwa kurang dari 50 persen rumah tangga menggunakan air bersih. Sementara itu, masih banyak rumah tangga yang menggunakan sumber air yang berpotensi tercemar, seperti sumur tak terlindungi atau mata air yang tidak terlindungi. Sekitar 14 persen dari rumah tangga tersebut mengandalkan sumber air tersebut sebagai sumber utama untuk air minum mereka (Badan Pusat Statistik, 2024a:44).

Saat ini, desa diharapkan dapat aktif dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dengan cara mengembangkan inovasi. Pemerintah mendorong desa untuk berkembang secara mandiri dan progresif, dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal dalam memajukan pembangunan mereka. Dukungan signifikan dari Pemerintah, seperti Dana Desa (DD) dan alokasi dari pemerintah daerah untuk proyek pembangunan (sesuai Pasal 72 UU Desa), diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta mengurangi tingkat kemiskinan sesuai Pasal 78 UU Desa (Premana et al., 2022:44).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 mengenai Panduan Pembangunan Desa, pembangunan desa mencakup empat bidang kunci, yakni tata kelola pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan sosial masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa dianggap sebagai fondasi pembangunan nasional; jika setiap desa dapat berkembang secara mandiri, kemakmuran masyarakat akan lebih mudah tercapai, dan tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia secara keseluruhan akan meningkat di seluruh

wilayah nusantara. Pembangunan pedesaan dilakukan melalui berbagai upaya untuk mengurangi kesenjangan perkembangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, yang sering kali terjadi akibat fokus pembangunan ekonomi sebelumnya yang lebih terpusat di perkotaan.

Pemerintah harus dapat memaksimalkan peranannya sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan, agar dapat mengelola dan meningkatkan pertumbuhan pedesaan. Pada saat ini, teknologi terus berkembang pesat. Digitalisasi desa dapat membantu dalam penyusunan basis data yang penting untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di desa. Program ini mendukung pengembangan potensi unggulan desa melalui pendataan dan *e-commerce*, mempercepat layanan publik kepada masyarakat desa, serta meningkatkan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan desa. Dengan membangun desa secara digital, diharapkan dapat meningkatkan potensi lokal desa, terutama dalam bidang pariwisata, UMKM, produk unggulan, dan potensi lainnya (Rakhman et al., 2023:284).

Pemerintah Provinsi Lampung hingga saat ini telah mengupayakan berbagai cara melalui perumusan dan penerapan kebijakan yang bertujuan untuk modernisasi desa guna mendukung pengembangan dan pertumbuhan desa. Salah satu kebijakan yang berfokus pada kemajuan desa adalah pengimplementasian *Smart village*. *Smart village* atau Desa Cerdas merupakan sebuah program pembangunan di Provinsi Lampung yang berfokus pada pengembangan wilayah desa, dengan periode pelaksanaan dari tahun 2020 hingga 2024. Program ini merupakan salah satu prioritas kerja Gubernur Lampung yang didesain untuk mendukung Visi Rakyat Lampung Berjaya, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024.

*Smart village* pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien dan berkelanjutan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program *Smart village* Provinsi Lampung merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengubah desa-desa yang belum mengenal teknologi menjadi

desa-desa yang terdigitalisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat di desa agar lebih peduli terhadap perubahan digital, melibatkan semua pihak terkait dari tingkat desa hingga provinsi. Fokus utamanya adalah memperkuat potensi ekonomi kreatif digital di Provinsi Lampung, dengan membidik sektor-sektor seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, pariwisata, logistik, maritim, dan pelayanan publik (Pemerintah Provinsi Lampung, 2019:34).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung memiliki peran sentral dalam berinteraksi langsung dengan lembaga dan aparatur desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009, DPMDT bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah terkait pemberdayaan masyarakat, desa, dan transmigrasi. Tugasnya mencakup dekonstruksi serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai kebijakan Gubernur berdasarkan regulasi yang berlaku. Sejalan dengan visi Gubernur Provinsi Lampung periode 2019-2024 untuk membangun desa-desa pintar dengan fokus utama pada pengenalan internet, digitalisasi administrasi desa, dan partisipasi masyarakat, DPMDT Provinsi Lampung secara langsung melaksanakan program-program unggulan ini di berbagai kabupaten dan kecamatan.

Penerapan kebijakan *Smart village* di Kabupaten Lampung Utara sebagai salah satu upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi, hingga saat ini masih terus diupayakan untuk memaksimalkan pengimplementasiannya. Salah satu daerah di Kabupaten Lampung Utara yang sudah mulai ada perubahan dan perkembangan untuk mulai berfokus pada penerapan pilar-pilar indikator *Smart village* adalah Kecamatan Kota Bumi.

Tabel 1. 5 Data Desa *Smart village* Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

No	Nama Desa	<i>Smart village</i> (sudah/belum)	Website
1	Bojong Barat	-	-
2	Kotabumi Tengah Barat	-	-
3	Sumber Arum	Sudah	Sumberarum.id
4	Talang Bojong	-	-

Sumber: Data DPMDT Web Open DK Kecamatan (2022)

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa ada empat desa yang berada di wilayah Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, yaitu Desa Bojong Barat, Desa Kotabumi Tengah Barat, Desa Sumber Arum dan Desa Talang Bojong. Dari keempat desa tersebut, hanya Desa Sumber Arum yang sudah menjalankan program *Smart village*, sedangkan ketiga desa lainnya belum mengimplementasikannya. Pemerintahan Desa Sumber Arum bahkan sudah memiliki website sendiri yaitu [sumberarum.id](http://sumberarum.id), dimana pada website ini ditujukan untuk mengintegrasikan data-data desa.



Gambar 1. 1 Data Demografi Penduduk Desa Sumber Arum Berdasarkan Pekerjaan  
Sumber: [sumberarum.id](http://sumberarum.id)

Melalui data di atas dapat diketahui bahwa Desa Sumber Arum meskipun sudah berupaya untuk mengimplementasikan program *Smart village* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun masih mengalami beberapa permasalahan khususnya terkait pekerjaan. Pada data di atas, penduduk di Desa Sumber Arum sebagian besar berstatus belum/tidak bekerja dan berstatus mengurus rumah tangga. Padahal 65,5% penduduk di Kabupaten Lampung Utara adalah penduduk usia kerja (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, 2024:40).

Permasalahan yang terjadi di atas, dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti ketidaksesuaian latar belakang yang dimiliki masyarakat dengan kebutuhan penyedia lapangan pekerjaan. Ketidaksesuaian latar belakang tersebut seperti pendidikan yang kurang sesuai, keterampilan yang kurang memadai, pengetahuan dan pemahaman yang kurang. Hal-hal tersebut sebenarnya berhubungan langsung dengan indikator-indikator *Smart village*. Hal ini menandakan bahwa, penerapan *Smart village* masih belum berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan data yang dihimpun peneliti ketika melaksanakan pra-riset, diketahui bahwa dari tiga indikator *Smart village* (*smart government*, *smart economy*, dan *smart people*), hanya indikator *smart government* saja yang sudah berjalan dengan baik, sedangkan indikator lainnya masih perlu untuk ditingkatkan kembali. Oleh sebab itu, Dinas PMDT harus melakukan pendampingan yang maksimal terhadap desa agar seluruh indikator *Smart village* dapat terpenuhi dengan baik, dan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita program ini dapat tercapai.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa saat ini Dinas PMDT Provinsi Lampung masih perlu melakukan perbaikan, peningkatan, dan pengembangan pelaksanaan program *Smart village* agar kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat. Berbagai penelitian terdahulu menjelaskan bahwa peranan dinas terkait dan desa merupakan sebuah satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki topik dan relevansi dengan penelitian ini yang akan peneliti jadikan sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Penelitian pertama oleh Premana, dkk (2022) dengan judul, “Pengembangan Desa Berbasis *Smart village* (Studi *Smart Governance* pada Pelayanan Prima Desa Tegalreja)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan Desa Tegalreja dengan konsep *Smart village* menggunakan konsep *smart governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Tegalreja sudah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, Desa Tegalreja telah mengoptimalkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan kebutuhan riil dalam berbagai bidang. Untuk meningkatkan transparansi informasi publik, Desa Tegalreja menggunakan Sistem Informasi Desa (SID).
2. Penelitian kedua oleh Ainiyah, dkk (2021) dengan judul, “Pengembangan Desa Digital Sebagai Upaya Mengangkat Potensi Lokal Desa Karangrejo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan potensi lokal desa kepada masyarakat umum dengan digitalisasi desa, dan sebagai upaya pengembangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini yang ditunjukkan melalui situs web diharapkan bisa mengangkat potensi lokal desa Karangrejo kepada khalayak umum, sehingga hal ini dapat berdampak pada kemajuan desa.

3. Penelitian ketiga oleh Mulya (2021) dengan judul, “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Negeri Sakti Kab. Pesawaran)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam meningkatkan kapasitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa), mengetahui dan menganalisis peran apa saja dari Dinas PMDT Provinsi Lampung untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas kemampuan anggota BPD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam meningkatkan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terbagi menjadi tiga tahap, yaitu peningkatan kapasitas individu, organisasi, dan sistem. Setiap tahap ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan anggota BPD, meskipun masih ditemui hambatan seperti kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai bagi BPD, sehingga BPD belum sepenuhnya memahami fungsi dan tugasnya dengan baik.
4. Penelitian keempat oleh Huda, dkk (2020) dengan judul, "Pengembangan Desa Berbasis *Smart village* (Studi *Smart Governance* pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)". Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Desa Talagasari dengan konsep *Smart village* menggunakan aspek *smart governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Desa Talagasari sudah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, Desa Talagasari juga mengelola dana desa berdasarkan inisiatif masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang nyata di berbagai sektor. Untuk meningkatkan transparansi informasi publik, Desa Talagasari menerapkan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID).

5. Penelitian kelima oleh Mahardhika (2018) dengan judul, “Implementasi Program *Smart* Kampung Bidang Pelayanan Publik Desa Kampung Anyar”. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat melalui program *smart* kampung khususnya bidang pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari implementasi *smart* kampung ini sudah berjalan baik sesuai dengan teori yang ada, namun hal yang menjadi masalah ialah jumlah pegawai staff pelayanan kurang, jaringan wifi dari kominfo yang lemah.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas diketahui bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, perbedaan lokasi akan memberikan perbedaan karakteristik, latar belakang, dan juga situasi dan kondisi yang dialami dan dihadapi. Perbedaan juga terletak pada fokus penelitian. Berdasarkan uraian masalah dan gap yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Desa Digital Melalui Program *Smart village* (Studi di Desa Sumber Arum Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di Provinsi Lampung dalam mewujudkan desa digital melalui program *Smart village*”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu "Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mewujudkan desa digital melalui program *Smart village*".

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan ataupun referensi untuk berbagai pihak mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transimgrasi Provinsi Lampung dalam program *Smart village*.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dibidang Ilmu Pemerintahan serta Universitas Lampung dengan pembahasan program *Smart village*.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini secara paktis ini diharapkan dapat memberi masukan serta sumbangan pemikiran, dan informasi sebagai dasar evaluasi bagi Pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transimgrasi Provinsi Lampung dalam proses pelaksanaan program *Smart village*.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi kajian strategi dan teknik pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan program *Smart village*.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Peran

#### 2.1.1 Pengertian Peran

Peran, dalam pengertian terminologi, adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah peran disebut "*role*," yang didefinisikan sebagai "tugas atau kewajiban seseorang dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan." Dengan kata lain, peran mengacu pada perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat. Di sisi lain, peranan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian atau peristiwa (Syamsir, 2014:86).

Peran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dilakukan oleh lembaga/organisasi umumnya diatur dalam ketetapan yang menjadi fungsi utama lembaga tersebut (Putra & Radjikan, 2023:68). Sedangkan menurut Soekanto (2002:243), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan peran. Dalam sebuah organisasi, setiap individu memiliki berbagai karakteristik dalam menjalankan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh organisasi atau lembaga tersebut.

Dari penjelasan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

### **2.1.2 Jenis-jenis Peran**

Adapun jenis peran menurut Soekanto (2002:243) dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

#### **1. Peran Aktif**

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

#### **2. Peran Partisipatif**

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan keuntungan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

#### **3. Peran Pasif**

Peran pasif adalah hasil yang diperoleh anggota kelompok yang bersifat pasif/menerima keuntungan saja, dimana anggota kelompok memberikan kesempatan kepada kelompok sehingga berjalan dengan baik.

### **2.1.3 Dimensi Peran**

Menurut Heroepoetri dan Santosa (2003; 67) teori peran adalah konsep yang digunakan dalam bidang sosiologi, psikologi, dan antropologi sebagai sebuah kerangka teoritis dan disiplin ilmu. Adapun beberapa dimensi peran yaitu:

1. Peran sebagai kebijakan: Pendekatan ini menekankan bahwa peran merupakan kebijakan yang tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi: Perspektif ini menganggap peran sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi: Peran digunakan sebagai alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintahan harus melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi masyarakat penting untuk menciptakan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.

4. Peran sebagai alat penyelesaian konflik: Persepsi ini menganggap peran sebagai cara untuk mengurangi atau menangani konflik dengan mencapai konsensus di antara berbagai pandangan yang ada. Prinsipnya adalah bahwa diskusi dan dialog dapat meningkatkan pemahaman, toleransi, serta mengurangi ketidakpercayaan dan ketegangan.

## 2.2 Tinjauan Peran Pemerintahan

Untuk memajukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik, seperti dalam pembangunan, peran pemerintah sering kali dijalankan melalui pendekatan yang terencana. Perencanaan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan masyarakat dengan lebih efektif. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan dalam implementasinya di masyarakat. Fungsi pemerintah modern saat ini terbagi menjadi empat bidang utama: pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Setiap warga negara secara terus-menerus berinteraksi dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena kebijakan publik tersebut mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum (Nilawati et al., 2021:1862).

Menurut Siagian (2000:128), fungsi utama pemerintah dalam suatu negara adalah untuk mengatur dan memberikan pelayanan. Fungsi pengaturan sering kali terkait dengan konsep negara modern sebagai negara hukum (*legal state*), sementara fungsi pelayanan berkaitan dengan konsep negara sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Sehingga dengan demikian, peran pemerintah dapat dipahami sebagai upaya untuk mengelola masyarakat dalam suatu negara, dengan tujuan utama menegakkan hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Secara lebih rinci, Siagian (2000: 142-150) menjelaskan peran dominan pemerintah dalam proses pembangunan nasional. Pemerintah memainkan peran sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan.

### 2.2.1 Peran Selaku Stabilisator

Dalam teori peran pemerintahan yang dikemukakan oleh Siagian, peran stabilisator mencakup berbagai aspek, termasuk stabilisasi ekonomi dan stabilisasi sosial budaya. Keduanya merupakan elemen kunci untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat serta memastikan bahwa organisasi atau negara berfungsi secara efektif.

#### a. Stabilisasi Ekonomi

Stabilitas ekonomi menciptakan iklim yang mendukung perekonomian nasional, sehingga berbagai aspek penting dapat terjaga dengan baik. Dengan adanya stabilitas ekonomi, perekonomian dapat tumbuh secara wajar, peluang usaha semakin luas, dan proses industrialisasi berjalan lancar. Stabilitas ekonomi ini sangat penting, dan peran pemerintah dalam mencapainya adalah "syarat mutlak" atau *conditio sine qua non* untuk pembangunan nasional.

Stabilitas ekonomi desa merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Ketika ekonomi desa tumbuh, hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ini seringkali diawali dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Melalui modernisasi pertanian, penggunaan teknologi tepat guna, serta akses yang lebih baik terhadap pasar dan modal, petani desa dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi. Dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pertanian, banyak masyarakat yang mulai mendiversifikasi sumber penghasilannya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mencakup bidang pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, kuliner lokal, dan pariwisata desa.

Peluang usaha semakin luas seiring dengan meningkatnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, yang memungkinkan masyarakat desa untuk memanfaatkan *platform* digital dalam pemasaran produk. *E-commerce* menjadi salah satu saluran penting bagi pengusaha desa untuk menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga secara global. Hal ini juga didukung

oleh berbagai program pemerintah seperti digitalisasi desa, yang memberikan pelatihan dan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital.

Selain itu, adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam program-program pembangunan desa, seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. BUMDes memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam usaha kolektif yang menguntungkan, seperti pengelolaan aset desa atau layanan publik berbasis ekonomi, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata. Peran kelembagaan seperti ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan distribusi kesejahteraan yang lebih adil.

Stabilitas ekonomi ini pada akhirnya menciptakan siklus positif di mana kesejahteraan masyarakat meningkat, ketimpangan sosial berkurang, dan peluang usaha terus bertambah, sehingga desa tidak hanya menjadi tempat tinggal yang layak, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dinamis dan berdaya saing.

#### **b. Stabilisasi Sosial Budaya**

Sebagai stabilisator sosial budaya, peran ini berfokus pada menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam aspek sosial dan budaya masyarakat. Ini mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan norma-norma yang ada serta pengelolaan perubahan sosial. Stabilitas sosial budaya di pedesaan memainkan peran sentral dalam menjaga identitas dan keutuhan komunitas, yang merupakan landasan bagi keberlangsungan kehidupan sosial yang harmonis. Perlindungan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan norma-norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi memastikan bahwa masyarakat tetap terhubung dengan akar tradisional mereka, sambil tetap mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan saling menghormati merupakan pilar utama dalam menjaga kerukunan antar warga desa. Tradisi gotong royong, misalnya, tidak hanya menjadi simbol kebersamaan tetapi juga menjadi cara praktis untuk menyelesaikan masalah kolektif, seperti pembangunan infrastruktur desa atau penyelenggaraan acara adat.

Budaya lokal yang mencakup berbagai ritual, kesenian, dan adat istiadat juga merupakan elemen kunci yang perlu dilindungi agar identitas desa tetap terjaga. Upaya pelestarian budaya ini dapat diwujudkan melalui pendidikan generasi muda tentang pentingnya menjaga tradisi, sekaligus mempromosikan seni dan budaya lokal melalui festival, pertunjukan, serta dokumentasi yang melibatkan berbagai media. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas komunitas tetapi juga berpotensi mendatangkan manfaat ekonomi melalui pariwisata budaya, yang pada gilirannya dapat mendukung stabilitas ekonomi desa.

Di sisi lain, norma-norma sosial seperti tata krama, hukum adat, dan aturan-aturan informal yang mengatur interaksi antar warga juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Norma-norma ini menjaga agar perilaku masyarakat tetap dalam koridor yang sesuai dengan adat dan tradisi setempat, sehingga mengurangi potensi konflik sosial. Misalnya, dalam penyelesaian perselisihan antar warga, masyarakat sering kali mengandalkan mekanisme musyawarah adat yang mengedepankan dialog dan penyelesaian damai, alih-alih menggunakan jalur hukum formal.

Namun, di tengah arus globalisasi dan modernisasi, stabilitas sosial budaya menghadapi tantangan besar. Pengaruh budaya luar dan teknologi digital dapat mengancam kelestarian tradisi lokal jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, tokoh adat, serta masyarakat untuk secara aktif melindungi dan mempromosikan nilai-nilai sosial budaya ini. Program-program seperti revitalisasi budaya, pendidikan berbasis lokal, dan penyusunan kebijakan yang mendukung pelestarian warisan budaya menjadi krusial dalam menjaga stabilitas sosial budaya desa di tengah perubahan yang terus terjadi.

### **2.2.2 Peran Selaku Inovator**

Inovasi adalah hasil dari kreativitas. Dalam konteks administrasi pembangunan, inovasi mencakup penciptaan, penerapan, dan penyebaran ide-ide serta solusi baru yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu, sebagai sektor inovator, pemerintah harus berfungsi sebagai sumber utama untuk menciptakan hal-hal baru.

#### **a. Inovasi Lingkungan Pemerintahan**

Inovasi harus diterapkan terlebih dahulu di lingkungan birokrasi pemerintahan. Inovasi ini dapat mengubah cara kerja yang lamban, sistem yang rumit, serta pola pikir yang berorientasi pada kekuasaan. Aparatur pemerintahan perlu mengadopsi pola pikir yang berfokus pada pelayanan. Jika pemerintah berhasil menciptakan birokrasi yang demikian, maka inovasi yang diperkenalkan kepada masyarakat akan lebih mudah diterima. Inovasi lingkungan pemerintahan merupakan upaya untuk memperkenalkan sesuatu yang baru atau melakukan perubahan signifikan dalam birokrasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas layanan publik.

Inovasi ini sering kali diwujudkan melalui penerapan teknologi digital, reformasi prosedural, atau pendekatan baru dalam pengambilan keputusan yang lebih partisipatif. Misalnya, digitalisasi layanan publik melalui penerapan sistem *e-government* mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pemerintahan secara online, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, dan mempercepat proses pelayanan. Dengan adanya sistem digital, pengajuan perizinan, pembayaran pajak, atau akses terhadap informasi publik dapat dilakukan dengan lebih transparan dan cepat, sehingga meningkatkan kepuasan warga terhadap layanan pemerintahan.

Selain itu, inovasi dalam lingkungan pemerintahan juga mencakup reformasi birokrasi yang berfokus pada penyederhanaan prosedur, pengurangan tumpang tindih regulasi, dan desentralisasi wewenang. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi hierarki yang terlalu panjang dalam pengambilan keputusan, sehingga pejabat di tingkat bawah memiliki lebih banyak otoritas untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan lokal. Inovasi seperti ini juga mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal, seperti tantangan ekonomi global atau krisis kesehatan, seperti yang terlihat dalam respons cepat beberapa pemerintah

daerah terhadap pandemi COVID-19 melalui pembentukan satuan tugas khusus atau sistem penyaluran bantuan berbasis data digital.

Selain aspek teknologi dan prosedural, inovasi dalam pemerintahan juga melibatkan perubahan dalam budaya organisasi. Penerapan nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi fondasi penting bagi birokrasi yang inovatif. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan atau pengawasan pelaksanaan program pemerintah, inovasi ini menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan warga. Hal ini terlihat dalam program-program seperti musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan langsung terhadap prioritas pembangunan di daerah mereka.

Inovasi dalam lingkungan pemerintahan tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan kualitas layanan publik, tetapi juga membantu menciptakan birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perubahan ini dapat menjadi katalis bagi peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta memperkuat tata kelola yang baik dalam jangka panjang.

#### **b. Inovasi Sistem, Prosedur, dan Metode Kerja**

Inovasi sistem merujuk pada pengembangan dan penerapan sistem baru atau perbaikan pada sistem yang ada untuk meningkatkan kinerja organisasi. Inovasi prosedur melibatkan perubahan atau pembaruan dalam tata cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam melaksanakan tugas atau aktivitas. Inovasi metode kerja berhubungan dengan pengembangan dan penerapan cara-cara baru dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja adalah suatu pendekatan terstruktur yang bertujuan untuk memperbarui atau menciptakan mekanisme baru dalam operasional organisasi, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas kinerja.

Inovasi sistem melibatkan pengembangan atau implementasi teknologi dan mekanisme baru yang mengintegrasikan berbagai elemen kerja, seperti manajemen sumber daya, komunikasi, dan aliran informasi, untuk menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi dan optimal. Sistem yang inovatif memungkinkan akses

informasi yang lebih mudah, transparan, dan terintegrasi antar unit atau divisi dalam organisasi, sehingga mempermudah pengambilan keputusan serta mempercepat proses penyelesaian pekerjaan.

Inovasi prosedur merujuk pada perubahan atau perbaikan alur kerja yang ada, dengan fokus pada penyederhanaan langkah-langkah dan penghapusan hambatan-hambatan yang tidak perlu dalam proses kerja. Tujuannya adalah untuk mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan, mengurangi kompleksitas, dan memastikan bahwa setiap langkah dalam prosedur memberikan nilai tambah. Prosedur yang inovatif biasanya dirancang dengan tujuan meminimalkan tumpang tindih tanggung jawab, memperjelas peran setiap individu atau unit, serta memastikan alur kerja yang lebih efisien dan produktif.

Sementara itu, inovasi metode kerja mengacu pada pengenalan atau modifikasi pendekatan dan cara pelaksanaan pekerjaan atau proyek, dengan tujuan meningkatkan kolaborasi, fleksibilitas, dan adaptabilitas dalam organisasi. Metode kerja yang inovatif sering kali mengedepankan pendekatan yang lebih dinamis, memungkinkan individu atau tim untuk bekerja dengan lebih responsif terhadap perubahan, serta mendorong kerja sama yang lebih baik antar anggota tim. Inovasi metode kerja juga mencakup penerapan teknik manajemen yang lebih fleksibel, yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan hasil yang lebih optimal dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Secara keseluruhan, inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja merupakan komponen kunci dalam proses peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan kinerja, dan tetap kompetitif di pasar atau sektor tempat mereka beroperasi.

### **2.2.3 Peran Selaku Modernisator**

Menurut Siagian (2000:142-150), dalam peran sebagai modernisator melalui pembangunan, setiap negara menginginkan untuk menjadi kuat dan mandiri. Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara perlu memiliki :

### **a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi**

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci peran pemerintah sebagai modernisator dalam mendorong pembangunan negara ke arah yang lebih maju dan modern. Sebagai penggerak utama, pemerintah diharapkan memperkenalkan inovasi dan teknologi baru, seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK), energi terbarukan, dan bioteknologi, untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan. Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, seperti sistem informasi dan *e-government*, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pemerintah berperan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta mendorong inovasi ekonomi dengan mendukung riset, penciptaan klaster industri berbasis teknologi tinggi, dan insentif untuk *start-up*. Keberlanjutan pembangunan juga menjadi fokus, dengan pemerintah memanfaatkan teknologi untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing individu, organisasi, maupun negara di era globalisasi dan digitalisasi. Untuk meningkatkan penguasaan IPTEK, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan investasi infrastruktur teknologi. Pendidikan formal, terutama di bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*), memainkan peran penting dalam membekali generasi muda dengan pengetahuan dasar yang kuat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pendidikan juga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru agar siswa memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman.

Di luar pendidikan formal, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kerja juga menjadi kunci untuk meningkatkan penguasaan IPTEK di sektor industri. Perusahaan dan institusi perlu berinvestasi dalam program pelatihan teknologi, riset dan pengembangan (R&D), serta kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi untuk memastikan karyawan mereka memiliki keterampilan terbaru dalam teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan otomatisasi. Hal ini tidak

hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memungkinkan inovasi yang terus berkembang di dalam organisasi.

Investasi dalam infrastruktur teknologi juga merupakan elemen penting untuk mendukung penguasaan IPTEK. Pemerintah dan sektor swasta perlu menyediakan akses yang merata terhadap internet dan perangkat teknologi canggih, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau kurang berkembang, agar semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam revolusi digital. Keterlibatan dalam teknologi digital global, seperti penggunaan perangkat lunak *open-source*, kolaborasi melalui *platform* daring, dan keterlibatan dalam komunitas inovasi internasional, juga dapat mempercepat proses penguasaan IPTEK di tingkat lokal dan nasional.

Dengan penguasaan IPTEK yang baik, suatu negara atau organisasi dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global. Pada akhirnya, peningkatan penguasaan IPTEK tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan solusi untuk tantangan-tantangan global, seperti perubahan iklim, kesehatan, dan ketahanan pangan.

#### **b. Kemampuan dan kemahiran manajerial**

Kemampuan dan kemahiran manajerial adalah aspek kunci dari peran modernisator pemerintah dalam memimpin pembangunan nasional menuju kemajuan yang berkelanjutan. Pemerintah modernisator perlu merencanakan dan mengelola program pembangunan dengan menetapkan tujuan yang jelas, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengevaluasi hasil. Kemampuan untuk mengoordinasikan berbagai sektor dan level pemerintahan juga penting untuk memastikan kolaborasi yang efektif. Pengambilan keputusan berbasis bukti, dengan analisis kebijakan mendalam dan metode evaluasi yang tepat, adalah bagian dari kemahiran manajerial.

Kemampuan dan kemahiran manajerial dalam konteks birokrasi pemerintahan sangat penting untuk memastikan efektivitas tata kelola dan pelayanan publik yang optimal. Di dalam birokrasi, manajer publik atau pejabat administrasi

memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, serta memastikan implementasi program-program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dalam birokrasi pemerintahan, diperlukan penguatan kapasitas pada aspek perencanaan strategis, pengelolaan tim, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Peningkatan kemampuan manajerial di lingkungan pemerintahan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan manajemen publik, yang dirancang untuk meningkatkan keahlian dalam menyusun kebijakan yang efektif, alokasi anggaran, dan pengelolaan proyek berskala besar. Program pelatihan kepemimpinan dan manajemen bagi pejabat pemerintah juga membantu mereka memahami kompleksitas birokrasi serta cara memotong rantai birokrasi yang berlebihan agar proses pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan transparan.

Selain pendidikan formal, kemahiran manajerial juga diperoleh dari pengalaman langsung dalam mengelola berbagai program publik. Pejabat yang mahir dalam manajemen mampu memimpin tim lintas sektor, mendorong kolaborasi antar instansi, dan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam tindakan nyata di lapangan. Kemampuan ini termasuk dalam pengelolaan konflik kepentingan, koordinasi antar lembaga, dan penanganan resistensi perubahan di lingkungan birokrasi yang sering kali berpegang pada rutinitas yang kaku.

Di era digital, kemampuan manajerial dalam birokrasi pemerintahan juga harus beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Manajer birokrasi yang terampil akan memanfaatkan data *real-time* untuk mengevaluasi kinerja program, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mengatur strategi intervensi yang tepat. Dengan sistem manajemen berbasis data, manajer di birokrasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya publik.

Secara keseluruhan, kemampuan manajerial yang tinggi di birokrasi pemerintahan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pejabat yang terus mengembangkan kemahiran manajerialnya akan lebih mampu mengatasi tantangan birokrasi yang kompleks, mendorong inovasi dalam pelayanan publik, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.

**c. Kemampuan dan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi**

Kemampuan dan kemahiran dalam mengelola kekayaan alam merupakan aspek kunci dari peran modernisator pemerintah dalam pembangunan nasional. Pemerintah modernisator harus dapat mengoptimalkan potensi kekayaan alam, seperti tambang mineral, hutan, dan energi, dengan kebijakan strategis untuk eksploitasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu mengolah kekayaan alam untuk menambah nilai ekonomi melalui pengembangan industri pengolahan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kedaulatan ekonomi. Kemampuan dalam mengolah kekayaan alam agar memiliki nilai tambah yang tinggi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Mengolah sumber daya alam (SDA) tidak hanya berarti memanfaatkan bahan mentah secara langsung, tetapi juga melalui proses transformasi yang menghasilkan produk dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Proses ini melibatkan teknologi, inovasi, dan manajemen yang efektif untuk mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir yang memiliki daya jual lebih baik di pasar lokal maupun global. Misalnya, hasil pertanian seperti kopi, kelapa sawit, atau hasil tambang seperti mineral dan logam, dapat diolah lebih lanjut melalui proses industri sehingga menghasilkan produk bernilai tinggi seperti produk pangan olahan, bahan kimia, atau perangkat teknologi.

Untuk mencapai nilai tambah yang tinggi, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi modern menjadi sangat penting. Teknologi ini memungkinkan proses pengolahan yang lebih efisien, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Selain itu,

teknologi juga membuka peluang untuk diversifikasi produk, yang tidak hanya meningkatkan daya saing di pasar global tetapi juga menciptakan peluang baru dalam rantai nilai. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan kualitas produk, memperpanjang umur penyimpanan, dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga sumber daya alam yang ada tidak hanya dieksploitasi secara berlebihan tetapi juga dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain aspek teknologi, inovasi dalam metode produksi dan pengelolaan juga menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah SDA. Inovasi ini meliputi pengembangan teknik produksi yang lebih efisien, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta pengembangan produk baru yang berbasis SDA lokal. Dengan menciptakan produk-produk inovatif dari SDA, nilai ekonomis produk akan meningkat, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, masyarakat lokal, dan pemerintah. Hal ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian di daerah yang kaya akan SDA.

Kemampuan untuk mengolah kekayaan alam dengan nilai tambah juga harus didukung oleh kebijakan yang tepat dari pemerintah, seperti insentif untuk industri pengolahan, perlindungan terhadap lingkungan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya sinergi antara teknologi, inovasi, dan kebijakan yang tepat, SDA dapat diolah dengan cara yang lebih produktif, memberikan nilai ekonomi yang lebih besar, serta menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas dan generasi mendatang.

#### **d. Memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan**

Memiliki visi yang jelas tentang masa depan adalah aspek penting dari peran modernisator pemerintah. Visi ini memberikan arah untuk pembangunan berkelanjutan dengan menggambarkan tujuan jangka panjang dalam sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti menjadi negara industri maju atau memiliki pendidikan berkualitas tinggi. Dengan visi yang jelas, pemerintah dapat menyusun rencana pembangunan yang terstruktur dan terkoordinasi, serta

merumuskan kebijakan strategis yang relevan. Visi tersebut juga mendorong inovasi dan transformasi di berbagai sektor, mempersiapkan pemerintah untuk menghadapi tantangan masa depan, dan membangun ketahanan nasional. Selain itu, visi yang jelas dapat menginspirasi dan memperoleh dukungan publik untuk implementasi kebijakan dan program pembangunan.

Memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan adalah elemen kunci dalam merencanakan dan mencapai tujuan jangka panjang, baik bagi individu, organisasi, maupun pemerintah. Visi merupakan gambaran yang konkret mengenai apa yang ingin dicapai di masa depan, serta memberikan arah dan fokus dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Ketika seseorang atau organisasi memiliki visi yang jelas, mereka tidak hanya memahami tujuan akhir yang ingin diraih, tetapi juga dapat merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Visi yang kuat memberikan panduan dalam menghadapi tantangan dan perubahan, serta menjadi motivasi untuk terus bergerak maju meskipun dihadapkan pada rintangan.

Pemahaman yang mendalam terhadap visi memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk bekerja selaras, karena visi tersebut menciptakan kesatuan arah dan semangat kolektif. Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, visi yang jelas juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang kuat, karena dapat menyatukan berbagai kepentingan dan pemangku kepentingan dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan visi yang kuat, sebuah organisasi dapat lebih mudah menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan membuat keputusan strategis yang konsisten dengan arah jangka panjang.

Selain itu, visi yang jelas membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih terfokus dan berorientasi masa depan. Setiap langkah yang diambil, baik dalam skala kecil maupun besar, selalu dievaluasi berdasarkan sejauh mana langkah tersebut mendekatkan organisasi atau individu kepada visi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, visi bertindak sebagai kompas yang menjaga fokus pada tujuan akhir, sekaligus mendorong inovasi dan adaptasi yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut di tengah perubahan lingkungan yang dinamis. Visi yang

kuat juga menginspirasi keberanian untuk menghadapi risiko, karena individu atau organisasi memiliki gambaran jelas tentang hasil yang diinginkan dan strategi untuk mencapainya.

**e. Orientasi masa depan**

Orientasi masa depan dalam peran modernisator pemerintah menekankan pentingnya memiliki pandangan jangka panjang dalam mengelola pembangunan dan transformasi negara. Pemerintah harus mampu merencanakan dan menetapkan tujuan strategis di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Dengan orientasi ini, pemerintah dapat merancang kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan global, seperti kemajuan teknologi dan tantangan ekonomi, sangat penting, begitu juga dengan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur. Visi jangka panjang yang jelas juga dapat menginspirasi masyarakat dan sektor swasta, membangun kesatuan visi nasional, dan meningkatkan semangat untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Orientasi masa depan adalah kemampuan untuk memiliki pandangan ke depan yang jelas dan terstruktur, yang memungkinkan individu atau organisasi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan dan peluang yang akan datang. Pandangan ke depan ini melibatkan analisis proaktif terhadap tren yang sedang berkembang, perubahan lingkungan, serta potensi risiko dan peluang yang mungkin muncul. Dengan orientasi masa depan yang baik, seseorang atau organisasi dapat merencanakan strategi jangka panjang yang lebih efektif, beradaptasi terhadap perubahan dengan lebih cepat, dan tetap relevan dalam konteks sosial, ekonomi, atau teknologi yang dinamis.

Orientasi masa depan juga mendorong pendekatan yang inovatif dan kreatif dalam menghadapi tantangan, karena individu atau organisasi yang berorientasi ke masa depan tidak hanya fokus pada keadaan saat ini, tetapi juga berusaha menciptakan solusi yang akan bermanfaat di masa mendatang. Mereka berinvestasi dalam pendidikan, teknologi, atau sumber daya yang akan mendukung tujuan jangka panjang, sambil tetap memperhitungkan dampak

keputusan hari ini terhadap keberlanjutan di masa depan. Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, orientasi masa depan berarti merumuskan kebijakan atau inisiatif yang tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memastikan kemajuan dan stabilitas jangka panjang.

Dengan memiliki orientasi masa depan yang kuat, individu dan organisasi lebih siap menghadapi perubahan tak terduga, seperti krisis ekonomi, perkembangan teknologi baru, atau pergeseran tren sosial. Pandangan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil saat ini selalu mempertimbangkan dampaknya pada generasi mendatang dan keberlanjutan keseluruhan, menciptakan nilai yang lebih besar dan berjangka panjang.

**f. Bersedia menerima perubahan.**

Aspek bersedia menerima perubahan dalam peran modernisator menekankan kemampuan pemerintah untuk menghadapi dan mengelola perubahan dalam kehidupan nasional. Pemerintah harus siap mengadaptasi inovasi baru dalam teknologi, kebijakan publik, dan sistem administrasi untuk meningkatkan efisiensi. Fleksibilitas dalam kebijakan juga penting untuk menyesuaikan strategi menghadapi perubahan eksternal, seperti perubahan ekonomi global atau teknologi baru. Kepemimpinan yang kuat dan komitmen diperlukan untuk mendukung transformasi dan membangun konsensus di antara pemangku kepentingan. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat perubahan serta respons terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim dan krisis kesehatan, juga merupakan bagian dari kesiapan pemerintah dalam menerima perubahan.

Bersedia menerima perubahan adalah sikap terbuka dan fleksibel dalam menghadapi dinamika yang terjadi di lingkungan sekitar, baik di level individu maupun organisasi. Perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, terutama dalam dunia yang semakin cepat berubah karena perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial. Dengan menerima perubahan, seseorang atau organisasi mampu beradaptasi dengan lebih baik, tidak terjebak dalam cara-cara lama, dan selalu siap mengadopsi pendekatan baru yang lebih efektif. Sikap ini mendorong inovasi, karena mereka yang terbuka terhadap perubahan lebih

cenderung mencari solusi kreatif dan inovatif untuk menghadapi tantangan yang muncul.

Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, kemampuan menerima perubahan menjadi faktor krusial untuk tetap relevan dan kompetitif. Organisasi yang enggan berubah sering kali tertinggal karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, preferensi masyarakat, atau dinamika pasar. Sebaliknya, organisasi yang bersedia menerima perubahan tidak hanya mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru, tetapi juga sering kali menjadi pelopor dalam memperkenalkan pembaruan atau inovasi yang mengubah cara bekerja atau berbisnis. Selain itu, kesiapan untuk menerima perubahan juga memungkinkan organisasi untuk mengelola perubahan secara lebih terstruktur, mengurangi resistensi internal, dan memaksimalkan manfaat dari setiap inovasi yang diterapkan.

Pada tingkat individu, menerima perubahan juga penting untuk pengembangan diri. Mereka yang terbuka terhadap perubahan lebih mudah belajar hal-hal baru, mengembangkan keterampilan baru, dan beradaptasi dengan situasi yang berubah. Ini membuat mereka lebih fleksibel dan mampu menghadapi tantangan dengan sikap positif, serta lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Menerima perubahan bukan hanya tentang beradaptasi, tetapi juga tentang memandang perubahan sebagai peluang untuk tumbuh, belajar, dan berkembang lebih baik.

#### **2.2.4 Peran Selaku Pelopor**

Pemerintah sebagai pelopor mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk memimpin dan memulai inisiatif baru yang dapat memacu perubahan dan inovasi di masyarakat. Sebagai pelopor, pemerintah tidak hanya mengikuti perkembangan tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan dan mendorong ide-ide baru yang akan membawa kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah bertindak sebagai pemimpin dan inisiator dalam berbagai aspek pembangunan dan perubahan. Ini melibatkan peran aktif dalam

memperkenalkan, mengembangkan, dan mempromosikan ide, kebijakan, atau program baru yang belum diterapkan sebelumnya.

Peran sebagai pelopor berarti menjadi perintis atau inisiator perubahan, yang berani mengambil langkah pertama untuk menciptakan inovasi dan transformasi di suatu organisasi, komunitas, atau lingkungan. Seorang pelopor tidak hanya memiliki visi yang jelas tentang masa depan, tetapi juga memiliki keberanian untuk menggerakkan perubahan, meskipun dihadapkan pada resistensi atau ketidakpastian. Pelopor berperan penting dalam membuka jalan bagi orang lain dengan memperkenalkan ide-ide baru, mengusulkan cara-cara baru dalam bekerja, atau merintis teknologi dan sistem baru yang lebih efisien dan efektif. Mereka tidak hanya beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga aktif mendorong perubahan yang membawa dampak positif.

Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, pelopor bertindak sebagai agen perubahan yang menginspirasi tim atau koleganya untuk keluar dari zona nyaman dan mengeksplorasi peluang-peluang baru. Mereka tidak takut mengambil risiko yang terukur untuk mencapai kemajuan dan siap menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan inovasi. Sebagai inisiator, seorang pelopor memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya kerja yang dinamis, kolaboratif, dan berorientasi pada pertumbuhan.

Dengan menjadi pelopor, seseorang atau organisasi juga mendorong percepatan perkembangan, baik di bidang teknologi, ekonomi, maupun sosial, karena mereka memperkenalkan perubahan yang menjadi model atau acuan bagi orang lain untuk diikuti. Sikap proaktif dan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh seorang pelopor menciptakan iklim perubahan yang lebih cepat dan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas atau anggota organisasi.

### **2.2.5 Peran Selaku Pelaksana Langsung**

Peran pemerintah sebagai pelaksana langsung mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek pembangunan secara praktis dan operasional. Sebagai pelaksana

langsung, pemerintah bertugas untuk memastikan bahwa rencana dan keputusan yang telah ditetapkan dalam kebijakan atau strategi pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan. Pemerintah berperan dalam menerjemahkan kebijakan dan rencana pembangunan menjadi tindakan konkret yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Ini melibatkan pelaksanaan tugas-tugas administratif, manajerial, dan operasional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Peran sebagai pelaksana langsung berarti menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan, program, atau tugas tertentu secara langsung di lapangan. Pelaksana langsung berada di garis depan proses pelaksanaan, memastikan bahwa visi, kebijakan, atau strategi yang telah dirumuskan dapat diterjemahkan menjadi tindakan konkret dan menghasilkan hasil nyata. Mereka tidak hanya mengikuti arahan yang telah ditetapkan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan pelaksanaan sesuai dengan kondisi di lapangan, menyelesaikan masalah yang muncul, dan memastikan kelancaran setiap tahapan kerja. Peran ini sangat krusial, karena tanpa implementasi yang baik, kebijakan atau program yang dirancang dengan baik pun tidak akan mencapai tujuannya.

Dalam konteks pemerintahan atau organisasi, pelaksana langsung sering kali terdiri dari tim operasional, pegawai lapangan, atau unit-unit eksekusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat atau klien. Mereka bertugas memastikan bahwa prosedur dilaksanakan sesuai dengan standar, waktu, dan sumber daya yang telah ditentukan. Pelaksana langsung juga perlu memiliki keterampilan teknis yang baik serta kemampuan untuk mengambil keputusan cepat saat menghadapi kendala di lapangan, sehingga program dapat tetap berjalan sesuai rencana. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan atau pihak yang merancang kebijakan, memberikan umpan balik terkait efektivitas implementasi, serta menyarankan perbaikan jika diperlukan.

Peran sebagai pelaksana langsung juga mencakup tanggung jawab besar dalam hal akuntabilitas. Mereka harus memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan dijalankan dengan integritas dan transparansi, menghindari penyimpangan, dan

memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Keberhasilan kebijakan atau program sangat bergantung pada dedikasi dan kompetensi pelaksana langsung dalam menjalankan tugas mereka dengan baik.

## **2.3 Tinjauan Desa**

### **2.3.1 Pengertian Desa**

Secara etimologis, kata "desa" berasal dari kata "*swadesi*", yang mengacu pada suatu tempat atau lingkungan yang tidak memihak dan otonom. Dalam bahasa Sangsekerta, desa diartikan sebagai tanah air, tempat kelahiran, atau asal usul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah sebuah unit wilayah yang dihuni oleh beberapa rumah tangga dan memiliki pemerintahan sendiri (dipimpin oleh seorang kepala desa). Desa juga dapat merujuk pada kumpulan rumah di luar kota metropolitan yang membentuk sebuah kesatuan.

Penjelasan tentang desa juga diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu entitas geografis yang terdiri dari wilayah yang relatif kecil, dengan populasi yang biasanya terdiri dari beberapa rumah tangga. Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, yang dilaksanakan sesuai dengan adat dan budaya yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap adat dan budaya desa menjadi dasar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa, menjadikan mereka sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran penting dalam struktur pembentukan negara. Desa

juga menjadi sebuah unit administratif yang memainkan peran krusial dalam menjaga keberlangsungan budaya dan tradisi lokal, serta memperkuat identitas nasional Indonesia.

### **2.3.2 Kedudukan Desa**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, posisi atau kedudukan desa diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 menegaskan bahwa tugas-tugas seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Sedangkan Pasal 5 menetapkan bahwa desa berada dalam lingkup administrasi Kabupaten/Kota.

Secara administratif, desa berada di bawah yurisdiksi Pemerintah Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, desa tetap memiliki kewenangan dan hak untuk mengatur urusan masyarakat berdasarkan tradisi dan adat istiadat lokal (prinsip swadaya). Pemerintah mengakui keberadaan desa sebagai struktur pemerintahan yang telah ada sejak sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dianggap sebagai unit pemerintahan terkecil yang relevan dalam pembentukan negara.

### **2.3.3 Kewenangan Desa**

Pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kemudian lebih rinci pada pasal 19, kewenangan desa diantaranya:

- a) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) kewenangan lokal berskala Desa;

- c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Kebijakan tersebut telah memunculkan kebijakan yang memungkinkan desa untuk mengelola urusannya secara mandiri (desa otonom). Kebijakan ini berdampak pada peningkatan yang signifikan dalam pengembangan inovasi di tingkat desa. Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan pedesaan melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan internet adalah dengan pengimplementasian konsep *Smart village*.

## **2.4 Tinjauan *Smart village***

*Smart village* adalah konsep turunan dari *smart city*, dengan perbedaan utamanya terletak pada lokasi penerapannya. Jika *smart city* diterapkan di tingkat kota, maka *Smart village* diterapkan di tingkat desa. Namun, belum ada konsensus yang jelas mengenai konsep *Smart village* ini. Hal ini disebabkan oleh variasi karakteristik unik di setiap desa yang membuatnya sulit untuk dibandingkan satu sama lain. Terlebih lagi, ada dinamika sosial yang terus berubah di dalamnya (Yanti, 2024:545).

### **2.4.1 Pengertian *Smart village***

*Smart village*, didefinisikan oleh *European Network for Rural Development*: “Desa cerdas adalah daerah pedesaan dan masyarakat yang membangun kekuatan dan aset yang ada serta peluang baru untuk mengembangkan nilai tambah dan di mana

jaringan tradisional dan baru ditingkatkan melalui teknologi komunikasi digital, inovasi, dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik untuk kepentingan penduduk.” Ini berarti *Smart village* adalah serangkaian layanan yang diberikan kepada masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Konsep *Smart village* tidak hanya berfokus pada optimalisasi penggunaan teknologi informasi, tetapi juga pada penguatan investasi manusia dan modal sosial masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan investasi fisik (infrastruktur) desa (Huda et al., 2020:545).

Sedangkan Premana dkk (2022:48) menjelaskan *Smart village* sebagai sebuah ide yang mengintegrasikan teknologi informasi dan prinsip keberlanjutan untuk membangun lingkungan desa yang efisien, produktif, dan mandiri. Kunci keberhasilan konsep *Smart village* terletak pada peningkatan pengetahuan masyarakat desa melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan. Melalui penerapan *Smart village*, pemerintah desa dapat lebih maksimal dalam mengelola sumber daya desa dengan cara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Lampung mengimplementasikan program *Smart village* sebagai bentuk pelaksanaan peran pembinaan dan pengawasan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik, partisipatif, terkendali dan akuntabel melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi, yang diarahkan kepada upaya peningkatan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi administrasi desa dan partisipasi masyarakat desa atau *e-participation*. Penerapan *Smart village* berpedoman pada tiga pilar utama yaitu *smart government*, *smart economy*, dan *smart people*.

#### **2.4.2 Pilar Utama *Smart village***

Implementasi *Smart village* di Provinsi Lampung berpijak pada 3 pilar utama yang akan dapat mewujudkan desa yang cerdas yaitu:

##### **a. *Smart government***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan urusan pemerintah harus melibatkan unsur masyarakat, yang menjadi dasar orientasi kebijakan pemerintah desa. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah

merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, di mana pemerintah desa berfungsi sebagai entitas terendah dalam struktur organisasi pemerintah. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan desa (Sulismadi et al., 2017:219).

*Smart government* adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam layanan publik dan pengambilan keputusan. Pemerintah Provinsi Lampung menerjemahkan *smart government* sebagai cara optimalisasi sistem layanan administrasi pemerintahan desa berbasis digital yang prima dan terintegrasi baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Tujuannya adalah untuk membuat pemerintah lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penggunaan data dan teknologi yang canggih.

Dalam praktiknya, *smart government* mencakup berbagai elemen, seperti:

1. Digitalisasi Layanan Publik: Menerapkan sistem digital untuk mengakses layanan publik, seperti pendaftaran, pembayaran pajak, dan pengajuan izin, sehingga mempermudah akses dan mempercepat proses.
2. Data Terintegrasi: Menggunakan data yang terintegrasi dan analitik untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti, serta untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Menerapkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi pemerintahan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta mengawasi kinerja pemerintah.
4. Partisipasi Masyarakat: Memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui *platform* digital, survei online, dan forum diskusi.
5. Inovasi dan Efisiensi: Mendorong inovasi dalam penyampaian layanan dan pengelolaan pemerintahan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efektivitas.

### **b. *Smart economy***

*Smart economy* adalah pembangunan sistem ekonomi yang dirancang untuk menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan, sehingga menciptakan ekosistem yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan sejalan dengan sektor-sektor unggulan daerah. Tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi dapat didorong secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bilgah et al., 2022:21). Pilar *smart economy* bertujuan untuk mendorong dan mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif lokal serta terciptanya pelaku usaha di desa (UMKM, BUMDes, Koperasi) yang dikolaborasikan dengan teknologi digital agar menjadi solusi atas berbagai masalah di desa.

Strategi yang diambil dalam *smart economy* ini menitikberatkan pada lingkungan industri yang kreatif dan sinergis, saling membutuhkan dan menguntungkan baik produksi, promosi, bahkan transaksi keuangan, dalam suasana yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nuraini et al., 2021:868). Berikut adalah beberapa elemen kunci dari *smart economy* dalam konteks *Smart village*:

1. **Infrastruktur digital:** Penyediaan infrastruktur digital yang memadai, yang memungkinkan masyarakat desa untuk terhubung dengan pasar global dan mengakses layanan serta informasi yang bermanfaat.
2. **Pemberdayaan UMKM, BUMDes, koperasi:** Dukungan untuk usaha lokal melalui *platform e-commerce*, alat digital, dan pelatihan, sehingga mereka dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.
3. **Pemasaran digital:** Memanfaatkan alat dan *platform* digital untuk memasarkan produk dan layanan desa secara efektif, termasuk media sosial dan *platform* digital lainnya untuk menjangkau konsumen lebih luas.
4. **Pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan:** Mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam semua aspek ekonomi desa untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

### c. *Smart people*

*Smart people* berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di desa. Program ini dirancang untuk memberikan akses yang luas kepada masyarakat desa terhadap informasi dan pengetahuan yang mereka butuhkan. Melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan, program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital, keterampilan teknis, dan pengetahuan umum. Tujuan utama dari pilar ini adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan akses informasi, memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka (Taufik, 2024:118).

Dalam konsep *Smart village* yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Lampung, pilar *smart people* bertujuan untuk mewujudkan berbagai potensi di Provinsi Lampung melalui inkubasi desa yang akan menjadi salah satu kekuatan sosial dan ekonomi digital di Lampung dan Indonesia. *Smart people* merujuk pada masyarakat desa yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi guna meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengembangkan komunitas mereka. Elemen kunci dari *smart people* dalam konteks *Smart village* meliputi:

1. Keterampilan Digital: Masyarakat desa dibekali dengan keterampilan digital yang memadai untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ini termasuk kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan internet, perangkat digital, dan aplikasi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan hingga bisnis.
2. Pendidikan dan Pelatihan: Penyediaan program pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, khususnya dalam bidang teknologi, manajemen, dan keterampilan profesional lainnya. Ini termasuk pelatihan dalam penggunaan teknologi baru dan aplikasi praktis untuk kehidupan sehari-hari.
3. Kewirausahaan dan Inovasi: Mendorong semangat kewirausahaan dan inovasi di kalangan penduduk desa, sehingga mereka dapat memulai dan mengelola usaha yang bermanfaat, berinovasi dalam produk dan layanan, dan memanfaatkan peluang ekonomi baru.

4. Keterampilan Sosial dan Komunitas: Memperkuat keterampilan sosial dan kemampuan untuk bekerja dalam kelompok, berkolaborasi, dan membangun komunitas yang harmonis. Ini termasuk keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik.

Melalui penerapan program *Smart village*, desa-desa dapat bertransformasi menjadi desa digital yang lebih efisien dalam pelayanan masyarakat. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada warga, tetapi juga berpotensi memperbaiki kesejahteraan dan daya saing komunitas secara keseluruhan. Melalui pemanfaatan teknologi yang tepat, desa-desa dapat mengoptimalkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan mencapai kemajuan yang signifikan (Pangaribowo, 2022:5).

## **2.5 Desa Digital**

Desa digital merupakan sebuah program yang bertujuan untuk pembedayaan masyarakat, pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses dan pelayanan informasi melalui penerapan teknologi. Program ini sangat penting di tengah kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini. Jika diimplementasikan secara efektif, digitalisasi desa dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa. Salah satu keuntungan dari digitalisasi desa adalah kemampuannya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Digitalisasi mempermudah akses informasi mengenai desa, terutama dalam aspek wisata dan rekreasi. Selain itu, dalam hal administrasi, penerapan sistem digital membuat pengumpulan data desa menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga mempermudah pemerintah dalam membuat kebijakan (Rusdianto et al., 2022:758).

Untuk mewujudkan desa digital, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Pertama, desa digital harus memiliki jaringan informasi dan komunikasi yang memadai; ini penting karena jaringan komunikasi yang baik diperlukan untuk mendukung sistem berbasis online. Kedua, diperlukan pendanaan yang cukup besar untuk merealisasikan desa digital. Saat ini, desa digital biasanya merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya.

Ketiga, harus ada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola berbagai layanan berbasis teknologi informasi online (Dahiri, 2019:198).

Beberapa sektor pedesaan yang perlu diprioritaskan dalam penerapan teknologi digital meliputi (Metanfanuan et al., 2021:138):

1. Sektor Pertanian: Sektor ini merupakan kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi. Selama pandemi COVID-19, sektor pertanian menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi.
2. Sektor Perkebunan: Sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komoditas perkebunan, mulai dari pemilihan bibit hingga pengemasan dan pemasaran, perlu didorong dengan bantuan teknologi digital.
3. Sektor Perikanan dan Peternakan: Sektor perikanan memiliki potensi besar untuk ditingkatkan melalui teknologi digital, baik dalam pengemasan maupun pemasaran ikan, tidak hanya untuk konsumsi domestik tetapi juga ekspor. Selain itu, sektor peternakan juga harus mendapatkan perhatian dalam digitalisasi desa untuk meningkatkan kualitas hasilnya, memenuhi kebutuhan protein hewani, dan berkontribusi pada kesehatan masyarakat serta produktivitas lokal.
4. Sektor Pariwisata: Selain kekayaan sumber daya alam, pedesaan juga memiliki keindahan alam yang melimpah. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi sub-sektornya sangat penting untuk didorong melalui teknologi digital.

## **2.6 Kerangka Berpikir**

Desa memiliki posisi strategis dalam konteks pembangunan nasional. Hal ini karena: (1) sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan; (2) sektor ekonomi dan kontribusi ekonomi pedesaan menjadi penyumbang terbesar bagi PDB Nasional; (3) masyarakat desa paling rentan terhadap dampak kebijakan nasional.

Oleh sebab itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus bisa merancang strategi pembangunan desa secara komprehensif.

Jika dilihat dari keadaan desa saat ini, pembangunan desa justru masih sering dikesampingkan, sehingga terjadi ketimpangan kesejahteraan dan keterbelakangan pada masyarakat desa. Berdasarkan data yang dihimpun, penduduk di pedesaan memiliki presentase tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (11,79%) dibandingkan penduduk di perkotaan (7,09%). Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 masih tergolong banyak. Salah satu daerah di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Lampung Utara yaitu sebanyak 105,91 ribu jiwa. Kemudian ditinjau dari Indeks Desa Membangun, pengembangan desa di Provinsi Lampung masih cukup rendah, sehingga sangat perlu untuk mendapat pendampingan dan dorongan pengembangan desa. Kabupaten Lampung Utara memiliki beberapa permasalahan, diantaranya (1) rata-rata pendidikan yang masih rendah yaitu hanya sampai kelas 2 tingkat sekolah menengah pertama; (2) kesulitan akses air bersih; dan (3) kemampuan dan keterampilan yang kurang memadai.

Salah satu cara untuk mengelola dan meningkatkan pertumbuhan pedesaan adalah melalui program modernisasi desa, mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Melalui program modernisasi ini dapat membantu pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan desa. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengupayakan modernisasi desa melalui pengimplemantasian *Smart village* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan program *Smart village* terhadap sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, pariwisata, logistik, maritim, dan pelayanan publik. Melalui *Smart village* diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien dan berkelanjutan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

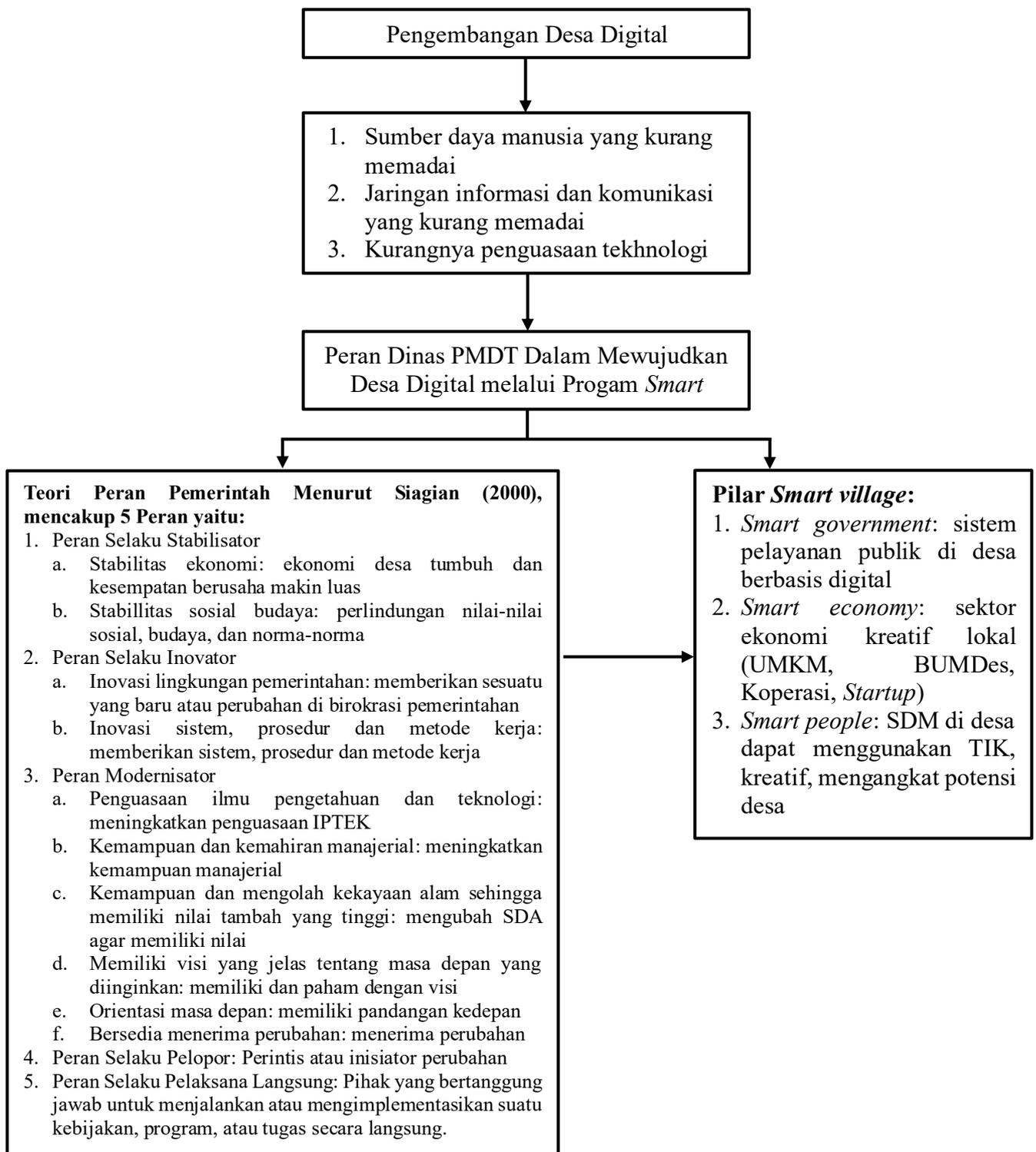
Dinas PMDT Provinsi Lampung menjadi lembaga pemerintah yang memiliki peran sentral dalam berinteraksi langsung dengan lembaga dan aparatur desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009. Dinas PMDT telah mengupayakan penerapan *Smart village* di Kecamatan Kota Bumi Kabupaten

Lampung Utara tepatnya pada desa bojong barat, desa kotabumi tengah barat, Desa Sumber Arum, dan desa bojong.

Desa Sumber Arum menjadi satu-satunya desa yang sudah menjalankan program *Smart village*. Namun, hingga saat ini Desa Sumber Arum masih mengalami beberapa permasalahan. Dilihat dari data yang ada, sebagian besar penduduk sumber arum berstatus belum/tidak bekerja, padahal 65% penduduk di Kabupaten Lampung utara adalah penduduk usia kerja. Permasalahan tersebut dapat timbul karena pendidikan yang kurang sesuai, keterampilan yang kurang memadai, pengetahuan dan pemahaman yang kurang. Hal-hal tersebut sebenarnya berhubungan langsung dengan indikator-indikator *Smart village*. Hal ini menandakan bahwa, penerapan *Smart village* masih belum berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan data yang dihimpun peneliti ketika melaksanakan pra-riset, diketahui bahwa dari tiga indikator *Smart village* (*smart government*, *smart economy*, dan *smart people*), hanya indikator *smart government* saja yang sudah berjalan dengan baik, sedangkan indikator lainnya masih perlu untuk ditingkatkan kembali. Oleh sebab itu, Dinas PMDT harus melakukan pendampingan yang maksimal terhadap desa agar seluruh indikator *Smart village* dapat terpenuhi dengan baik, dan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita program ini dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Dinas PMDT dalam mewujudkan desa digital melalui program *Smart village* di Desa Sumber Arum. Sehingga dapat diperoleh hasil akhir bahwa Dinas PMDT apakah berperan atau tidak berperan dalam mewujudkan desa digital melalui program *Smart village* di desa sumber arum.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir  
Sumber: Data Diolah Peneliti

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan berbagai fenomena, baik yang alami maupun yang dibuat, termasuk kondisi yang ada, hubungan yang terjalin, opini yang berkembang, proses yang berlangsung, dampak yang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berlangsung (Linarwati et al., 2016:1). Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis bersifat inuktif kualitatif, dan hasil penelitian lebih mengutamakan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2020:24).

Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh penjelasan yang sifatnya lebih mendalam mengenai peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mewujudkan desa digital melalui program *Smart village* di Desa Sumber Arum. Penjelasan dapat diperoleh setelah melaksanakan analisis terhadap peran DPMDT, kemudian ditarik kesimpulan berbentuk penjelasan secara umum tentang fakta pada lapangan.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Alasan peneliti melakukan penelitian di DPMDT

dikarenakan DPMDT Provinsi Lampung memiliki bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan yang bertugas dan mendukung, melaksanakan, memfasilitasi, dan mengkoordinasi seluruh kecamatan, kelurahan, dan desa yang tersebar di Provinsi Lampung terhadap program *Smart village*. Kemudian alasan peneliti memilih Desa Sumber Arum karena desa tersebut merupakan salah satu desa di Kecamatan Kotabumi yang sudah menggunakan *Smart village* namun Dinas PMDT belum berperan.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu batasan permasalahan pada penelitian kualitatif yang didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi serta tingkat kelayakan permasalahan yang akan dipecahkan, serta faktor keterbatasan tenaga, dana serta waktu. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya (Sugiyono, 2020:209).

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mewujudkan desa digital di Desa Sumber Arum. Peranan Dinas PMDT akan ditinjau menggunakan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2000:142-150) mengenai peran pemerintahan yang mencakup 5 peran yaitu:

1. Peran Selaku Stabilisator
  - a. Stabilitas ekonomi: ekonomi desa tumbuh dan kesempatan berusaha makin luas
  - b. Stabilitas sosial budaya: perlindungan nilai-nilai sosial, budaya, dan norma-norma

2. Peran Selaku Inovator
  - a. Inovasi lingkungan pemerintahan: memberikan sesuatu yang baru atau perubahan di birokrasi pemerintahan
  - b. Inovasi sistem, prosedur dan metode kerja: memberikan sistem, prosedur dan metode kerja
3. Peran Modernisator
  - a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi: meningkatkan penguasaan IPTEK
  - b. Kemampuan dan kemahiran manajerial: meningkatkan kemampuan manajerial
  - c. Kemampuan dan mengolah kekayaan alam sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi: mengubah SDA agar memiliki nilai
  - d. Memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan: memiliki dan paham dengan visi
  - e. Orientasi masa depan: memiliki pandangan ke depan
  - f. Bersedia menerima perubahan: menerima perubahan
4. Peran Selaku Pelopor: Perintis atau inisiator perubahan
5. Peran Selaku Pelaksana Langsung: Pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan atau mengimplementasikan suatu kebijakan, program, atau tugas secara langsung.

Teori tersebut akan dikembangkan kedalam tiga pilar *Smart village* yaitu *smart government*, *smart economy*, dan *smart people*. Dengan rincian sebagai berikut:

### 1. *Smart Government*

- 1.1 Inovasi Lingkungan Pemerintahan
- 1.2 Inovasi Sistem, Prosedur dan Metode Kerja
- 1.3 Kemampuan dan Kemahiran Manajerial
- 1.4 Pelopor menuju perubahan dan pengembangan desa
- 1.5 Pelaksana langsung kebijakan

### 2. *Smart Economy*

- 2.1 Kemampuan menjaga stabilitas ekonomi

2.2 Kemampuan dan Mengolah Kekayaan Alam yang Dimiliki Sehingga Memiliki Nilai Tambah yang Tinggi

2.3 Orientasi Masa Depan

### 3. *Smart People*

3.1 Kemampuan menjaga stabilitas sosial budaya

3.2 Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

3.3 Memiliki Visi yang Jelas Tentang Masa Depan yang Diinginkan

3.4 Bersedia Menerima Perubahan

Melalui hal tersebut, maka peneliti dapat melihat bagaimana peran Dinas PMDT dalam mewujudkan desa digital di Desa Sumber Arum.

### 3.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

#### 1. **Data Primer**

Menurut Sugiyono (2020:121) data primer ialah sumber data yang secara langsung memberikan data penelitian kepada peneliti. Sumber data primer diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan wawancara dengan informan mengenai peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam mewujudkan desa digital melalui program *Smart village* di Desa Sumber Arum.

#### 2. **Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2020:121) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu referensi dari beberapa jurnal, artikel, dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan memilih secara langsung namun berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu kemampuan informan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Sugiyono, 2020:125). Adapun informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Saprul Al Hadi	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (DPMDT Prov. Lampung)
2	Nurman	Kasi Pemerintahan Desa (DPMD Kabupaten Lampung Utara)
3	Fitriono	Operator <i>Smart village</i> Desa Sumber Arum Lampung Utara / Masyarakat
4	Felysia Geovani	Kasi Kesejahteraan Desa Sumber Arum Kotabumi Lampung Utara
5	Gabriel Saputro	Bintoro Kepala Desa Sumber Arum Kotabumi Lampung Utara
6	Nur	Masyarakat
7	Wahyu Ardi	Masyarakat
8	Ngatimin	Masyarakat
9	Kasih	Masyarakat
10	Marliadi	Pengamat / Jurnalis
11	Yusuf Nahromi	Tokoh Masyarakat

Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Observasi

Sugiyono (2019:110) mengungkapkan jika observasi menjadi dasar atas semua ilmu pengetahuan. Observasi yaitu pengamatan serta pencatatan dengan sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian terkait tingkah

laku melalui melihat atau mengamati secara langsung. Tujuan penggunaan teknik observasi adalah agar peneliti bisa mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam. Peneliti melakukan observasi melalui website program dan melihat langsung fasilitas digital yang diberi DPMDT terhadap desa sebagai alat pendukung.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Sementara Nazir dalam Sugiyono (2019: 138) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara si peneliti atau pewawancara dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara ini dilakukan oleh peneliti sebagai cara mengumpulkan informasi terkait peran DPMDT Provinsi Lampung dalam mewujudkan desa digital melalui program *Smart village*.

Alasan peneliti menggunakan metode wawancara agar peneliti dapat menemukan informasi secara terbuka dan menemukan permasalahan secara akurat yang di dapatkan langsung melalui informan. Peneliti telah melakukan turun lapangan dan melakukan wawancara kepada perangkat DPMDT Provinsi Lampung, perangkat DPMD Kabupaten Lampung Utara, perangkat Desa Sumber Arum, operator *Smart village desa*, masyarakat desa, pengamat sekaligus jurnalis, dan tokoh masyarakat pada tanggal 3 Januari 2023 sampai terakhir tanggal 31 Agustus 2024.

## **3. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2019: 240) dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti dokumentasi, *handphone* untuk keperluan *recording*, dan buku untuk kepentingan mencatat segala hal penting untuk ditulis.

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperoleh, selanjutnya tahap yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Menurut Singarimbun (dalam Efendi dkk., 2008: 240) menjelaskan teknik pengolahan data terdiri dari:

#### **1. Editing Data**

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh untuk menjamin validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan.

#### **2. Interpretasi data**

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia. Peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Menurut (Sugiyono, 2019: 334) analisis data yaitu proses dalam mencari serta menyusun dengan sistematis data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, melalui mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat sebuah kesimpulan supaya lebih mudah untuk dipahami baik diri sendiri maupun orang lain.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah memilih dan merangkum data, merangkum hal-hal pokok kemudian menganalisis bagian data menjadi ringkas. Kegiatan ini dilakukan seperti mengelompokkan data, memperjelas data, dan dikelompokkan untuk menarik kesimpulan, reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah data hasil wawancara. Peneliti melakukan penyederhanaan dari hasil wawancara di lapangan agar memudahkan pembaca melihat hasil yang sederhana dan akurat.

### **2. Penyajian Data**

Setelah dilakukan reduksi data tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah kesatuan data yang terkumpul sehingga dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan peneliti pada penyajian data selanjutnya adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

### **3. Verifikasi dan Kesimpulan**

Verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan makna yang lebih jelas mengenai kebenaran dan validitasnya pada penelitian ini peneliti akan menyimpulkan bagaimana peran DPMDT dalam mewujudkan desa digital melalui program *Smart village*. Setelah menelaah validitas data peneliti melakukan penarikan kesimpulan sebagai bentuk hasil penelitian secara keseluruhan mengenai topik penelitian.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung**

#### **4.1.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung berdiri sejak Tahun 1970 dan telah mengalami banyak perubahan secara nomenklatur dari awal berdirinya hingga sekarang. Tahun 1970 awal berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung memiliki nama Bantuan Pembangunan Desa (BANGDES), kemudian pada Tahun 2000 berganti nama menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada tahun 2001 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami perubahan peraturan dan berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Secara nomenklatur sejak Tahun 2007 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Provinsi Lampung. Pada tahun 2008 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Lampung berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Lampung sampai sekarang.

Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2009, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a) Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya guna efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.
- b) Meningkatkan kapasitas aparatur desa atau kelurahan serta pemberdayaan dan kelembagaan desa atau kelurahan, adat sosial masyarakat serta pemanfaatan sumber daya alam.
- c) Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan menuntaskan kemiskinan melalui pembangunan wilayah desa dan daerah tertinggal.
- d) Proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- e) Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan dalam membangun desa atau kelurahan.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung**

##### **1. Visi**

Lampung Maju dan Sejahtera 2019. Maksud dari visi tersebut yaitu mampu mewujudkan masyarakat Lampung yang maju, sejahtera dan berdaya saing. Maju dalam arti mencakup kemajuan perekonomian, pendidikan, teknologi, politik dan hukum. Tanah Sai Bumi Ruwa Jurai, sejahtera melalui revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat Lampung menjadi lebih kreatif dan produktif, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dengan segala potensi dan kelebihan yang dimiliki.

## **2. Misi**

- a) Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
- b) Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan.
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan teknologi, inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran.
- d) Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e) Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

### **4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung**

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ket transmigrasian dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
- b) Pembinaan, pengendalian, pengawasan serta koordinasi; dan
- c) Pelaksanaan administrasi Dinas

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Perumusan perencanaan dan program pengumpulan serta analisis data
- b) Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- c) Penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan;
- d) Pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- e) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; dan
- f) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi membawahi:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Perencanaan

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## **3. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Bidang Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dibidang Desa dan Kelurahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Untuk menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan pedoman fasilitasi administrasi desa dan pengembangan desa/kelurahan; dan
- b) Perumusan pedoman fasilitasi pengelolaan keuangan desa, aset desa dan pengembangan kapasitas desa.
- c) Perumusan pedoman pengembangan dan peningkatan kapasitas
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Bidang Kelembagaan Sosial dan Budaya**

Bidang Kelembagaan Sosial dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dibidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan pedoman fasilitasi pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat;
- b) Perumusan pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya masyarakat dan partisipasi masyarakat.

#### **5. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Masyarakat Desa**

Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dibidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan usaha ekonomi masyarakat;
- b) Perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan usaha ekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggal;
- c) Perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan kerjasama, kemitraan dan Kawasan Perdesaan; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## **6. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dibidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan pedoman pendayagunaan sumber daya alam pedesaan; dan
- b) Perumusan pedoman pendayagunaan teknologi tepat guna pedesaan.
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **7. Bidang Ketransmigrasian**

Bidang ketransmigrasian mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang Ketransmigrasian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang ketransmigrasian mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketransmigrasian;
6. Pelaksanaan administrasi Bidang Transmigrasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Desa Digital Melalui Program *Smart village* di Desa Sumber Arum Kotabumi Kabupaten Lampung Utara sudah berperan. Adapun penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut:

#### a. *Smart government*

Pada indikator *smart government* Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sudah berperan optimal dalam mewujudkan desa digital melalui program *Smart village* di Desa Sumber Arum. Hal ini dilihat dari:

- 1) Aspek inovasi lingkungan pemerintahan melalui program *Smart village*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tidak hanya menerapkan teknologi baru, tetapi juga melibatkan transformasi sosial dan kultural yang lebih luas. Peran pemerintah sebagai fasilitator inovasi ini sangat penting dalam menghadapi tantangan yang ada, dengan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 2) Aspek Inovasi Sistem, Prosedur dan Metode Kerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah berhasil mentransformasi pemerintahan desa menjadi lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Digitalisasi administrasi dan layanan publik meningkatkan akurasi, transparansi, serta mempercepat proses kerja, sementara partisipasi masyarakat dalam pemerintahan diperkuat melalui teknologi. Melalui cara ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih terbuka dan akuntabel.

- 3) Aspek kemampuan dan kemahiran manajerial yang dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan yang meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial aparatur desa, serta menyediakan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung sistem informasi administrasi desa.
- 4) Aspek Pelopor Menuju Perubahan dan Pengembangan Desa. Dengan mengedepankan pelatihan, penyediaan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat, dinas berhasil menciptakan fondasi yang kokoh untuk mewujudkan desa yang lebih maju, efisien, dan berdaya saing. Kolaborasi dengan berbagai pihak serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan keterlibatan warga juga menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengembangkan desa.
- 5) Aspek Pelaksana Langsung Kebijakan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memastikan implementasi kebijakan *Smart village* berjalan sesuai rencana melalui pengawasan yang ketat, pelatihan yang intensif, serta pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Dinas PMDT Provinsi Lampung memiliki kemampuan adaptasi yang baik dalam mencari solusi dan membangun dukungan dari berbagai pihak. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan di desa.

**b. *Smart economy***

Pada indikator *smart economy* Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sudah berperan optimal dalam mewujudkan desa digital melalui program *Smart village* di Desa Sumber Arum. Hal ini dilihat dari:

- 1) Aspek kemampuan menjaga stabilitas ekonomi. Melalui pendekatan berbasis teknologi, Dinas PMDT menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif, memperkuat ketahanan ekonomi desa, dan memastikan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Dinas PMDT Provinsi Lampung memberikan fasilitasi akses ke *e-commerce* sehingga memungkinkan

pelaku usaha kecil untuk lebih kompetitif, sementara inovasi dalam sektor-sektor seperti pertanian membantu meningkatkan hasil produksi. Dampak positif dari inisiatif ini, seperti peningkatan pendapatan masyarakat desa, terlihat melalui berbagai indikator ekonomi.

- 2) Aspek kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi tidak terealisasi di Desa Sumber Arum karena desa tersebut tidak memiliki kekayaan alam yang cukup untuk dijadikan potensi utama pengembangan ekonomi. Namun, sebagai alternatif, desa ini beralih ke program ekonomi kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 3) Aspek orientasi masa depan juga menunjukkan kemajuan signifikan. Meskipun masih banyak tantangan yang perlu diatasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Provinsi Lampung telah mengambil langkah-langkah penting dengan memperbaiki akses jalan dan saluran air di Desa Sumber Arum.

**c. *Smart people***

Pada indikator *smart people* Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sudah berperan optimal dalam mewujudkan desa digital melalui program *Smart village* di Desa Sumber Arum. Hal ini dilihat dari:

- 1) Kemampuan menjaga stabilitas sosial budaya. Dinas PMDT Provinsi Lampung berperan aktif sebagai mediator, mengelola ketegangan sosial yang mungkin muncul dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Dengan demikian, program *Smart village* tidak hanya membawa inovasi teknologi, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan tradisi lokal yang menjadi jantung kehidupan sosial desa. Upaya ini tidak hanya mempertahankan stabilitas sosial budaya, tetapi juga memastikan keberhasilan jangka panjang dari program-program inovatif yang mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan tanpa mengabaikan akar budaya masyarakat.

- 2) Aspek penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin baik di kalangan masyarakat mengenai teknologi digital, serta keberhasilan kerjasama dengan Binus dalam memberikan pembinaan PusGita atau Perpustakaan Digital. Selain itu, anak-anak sekolah yang kini telah dikenalkan dengan pembelajaran menggunakan media digital di Perpustakaan menunjukkan dampak langsung dari upaya tersebut.
- 3) Aspek memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan telah menyusun dan merumuskan rencana strategis yang terarah, dinas ini berhasil menciptakan gambaran yang konkret mengenai tujuan jangka panjang untuk pengembangan desa. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung secara aktif melibatkan masyarakat dalam memberikan aspirasi dan masukan, memastikan bahwa visi yang dikembangkan tidak hanya mencerminkan kebutuhan teknis tetapi juga aspirasi kolektif warga.
- 4) Aspek bersedia menerima perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah berhasil melakukan edukasi secara non-formal kepada masyarakat, yang merupakan indikator penting dalam efektivitas proses adaptasi teknologi.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat Peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. *Smart government***

- 1) Aspek Inovasi Lingkungan Pemerintahan. Dinas PMDT Provinsi Lampung dapat melakukan analisis mendalam tentang dampak teknologi baru terhadap perubahan sosial dan kultural di desa. Pastikan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam proses inovasi untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.
- 2) Aspek Inovasi Sistem, Prosedur, dan Metode Kerja. Tetapkan metrik kinerja yang jelas untuk menilai dampak digitalisasi pada administrasi dan layanan publik, mencakup kecepatan proses, akurasi data, dan kepuasan masyarakat.

Fokus pada pelatihan berkelanjutan dan dukungan untuk aparatur desa serta masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal.

- 3) Aspek Kemampuan dan Kemahiran Manajerial. Rancang program pelatihan yang terintegrasi, mencakup keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan, untuk membantu aparatur desa dalam mengelola perubahan.
- 4) Aspek Pelopor Menuju Perubahan dan Pengembangan Desa. Terapkan pendekatan terintegrasi dalam pelatihan, penyediaan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan keberhasilan program. Perluas kolaborasi dengan mitra strategis seperti lembaga pendidikan dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan desa secara komprehensif.
- 5) Aspek Pelaksana Langsung Kebijakan. Implementasikan sistem pengawasan dan pelaporan yang transparan untuk memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai rencana, dengan penggunaan data untuk memonitor kemajuan dan mengidentifikasi masalah lebih awal.

**b. *Smart economy***

- 1) Aspek kemampuan menjaga stabilitas ekonomi. Lakukan evaluasi mendalam mengenai dampak teknologi terhadap stabilitas ekonomi desa dengan menggunakan indikator yang jelas seperti peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan usaha kecil, dan efisiensi hasil produksi. Tingkatkan akses dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil untuk memanfaatkan *e-commerce* secara optimal, serta dorong inovasi berkelanjutan dalam sektor-sektor kunci seperti pertanian untuk memastikan hasil produksi yang lebih baik.
- 2) Aspek kemampuan mengolah kekayaan alam, meskipun Desa Sumber Arum tidak memiliki kekayaan alam yang signifikan untuk pengembangan ekonomi, beralih ke program ekonomi kreatif adalah langkah yang tepat. Namun, untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif, disarankan agar desa ini fokus pada identifikasi dan pengembangan keunggulan lokal yang unik, seperti kerajinan tangan, seni, atau produk lokal yang dapat dipasarkan secara luas. Selain itu, penting untuk melakukan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif di desa agar mereka dapat memanfaatkan teknologi digital dan pemasaran online untuk memperluas

jangkauan pasar. Kerjasama dengan lembaga pendidikan atau sektor swasta untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial juga dapat meningkatkan keberhasilan program ini.

- 3) Aspek orientasi masa depan, meskipun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah melakukan perbaikan penting dalam akses jalan dan saluran air, tantangan yang tersisa perlu diatasi dengan strategi yang lebih terintegrasi. Disarankan untuk mengembangkan rencana jangka panjang yang mencakup pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur secara berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang telah dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Mengintegrasikan teknologi *Smart village* dalam pengelolaan infrastruktur juga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan proyek.

#### **c. *Smart people***

1. Aspek Kemampuan menjaga stabilitas sosial budaya. Untuk menjaga stabilitas sosial budaya secara efektif, Dinas PMDT Provinsi Lampung sebaiknya terus memperkuat perannya sebagai mediator dengan mengimplementasikan mekanisme dialog yang inklusif antara semua pihak yang terlibat. Lakukan studi mendalam untuk memahami dinamika sosial dan budaya lokal, dan pastikan bahwa setiap inovasi teknologi diintegrasikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan tradisi setempat. Kembangkan program yang tidak hanya mendukung adopsi teknologi tetapi juga memperkuat tradisi dan praktik budaya lokal, guna mencapai keseimbangan yang harmonis.
2. Aspek Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, meskipun adanya peningkatan dalam penguasaan teknologi digital dan keberhasilan kerjasama dengan Binus untuk pembinaan PusGita, penting untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program ini. Saran untuk meningkatkan aspek ini termasuk, pertama mengembangkan program pelatihan berkelanjutan untuk masyarakat, terutama bagi kelompok yang mungkin belum sepenuhnya

terakses atau terlatih dalam teknologi digital. Kedua, memperluas kerjasama dengan institusi pendidikan lain atau sektor industri untuk memperkaya materi pelatihan dan menyediakan sumber daya tambahan. Ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan PusGita dan media digital di Perpusteds untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan atau penyesuaian agar tetap relevan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

3. Aspek memiliki visi yang jelas tentang masa depan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah berhasil merumuskan rencana strategis yang jelas dan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Untuk lebih meningkatkan efektivitas visi tersebut, disarankan untuk: pertama, mengimplementasikan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terstruktur untuk menilai kemajuan dalam pencapaian tujuan jangka panjang dan mengidentifikasi potensi kendala lebih awal. Kedua, memperkuat komunikasi antara dinas dan masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi warga terus diperbarui dan dipertimbangkan dalam penyesuaian rencana. Ketiga, menyusun rencana cadangan atau strategi mitigasi untuk menghadapi perubahan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian visi.
4. Aspek bersedia menerima perubahan, keberhasilan dalam melakukan edukasi non-formal kepada masyarakat adalah langkah penting dalam proses adaptasi teknologi. Untuk meningkatkan efektivitas proses adaptasi teknologi lebih lanjut, saran yang dapat dipertimbangkan adalah pertama, mengembangkan modul pelatihan yang lebih interaktif dan berbasis kasus nyata agar masyarakat dapat lebih memahami aplikasi praktis dari teknologi. Kedua, melakukan survei atau studi tentang dampak pelatihan non-formal terhadap tingkat adopsi teknologi dan mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian. Ketiga, memperluas jangkauan edukasi dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, seperti *platform* digital, radio komunitas, atau media sosial, untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam.

---

# **DAFTAR PUSTAKA**

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja journal*, 2(2), 135-147.
- Badan Pusat Statistik. (2024a). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2024b). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara. (2024). *Kabupaten Lampung Utara Dalam Angka 2024*.
- Bilgah, Herawaty, M. T., Asep, Aisyah, N., Joesah, N., & Pura, A. S. (2022). *Smart Ekonomi*. Jakarta: Tim Kun Fayakun.
- Dahiri. (2019). *Desa Digital: Potensi dan Tantangannya*. Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Dinas PMDT Provinsi Lampung. (2022). *Laporan Kinerja Tahun 2022*.
- Heroepoetri, A., & Santosa, A. (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020). Pengembangan Desa Berbasis *Smart village* (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3).
- Kamsina, K. (2020). Integrasi Teknologi Dalam Pembelajaran Implementasi Pembelajaran Ilmu Teknologi Dan Masyarakat. *Edueksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 9(2).
- Linarwati, M., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus. *Journal of Management*, 2(2), 1–8.
- Mahardhika, A. (2018). *Implementasi Program Smart Kampung Bidang Pelayanan Publik di Desa Kampung Anyar*. Skripsi, Universitas Brawijaya.

- Metanfanuan, T., Herlambang, M. A. T., Krishernawan, I., Lestari, N. P., Ginting, S., Supriyanto, E. E., & Nugroho, L. (2021). *Pengantar Manajemen Potensi Desa: Aku Yakin desaku Punya Sejuta Potensi*. Jawa Timur: CV Agrapana Media.
- Mulya, S. T. (2022). *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Negeri Sakti Kab. Pesawaran)*. Skripsi, Universitas Lampung.
- Nilawati, Mahsyar, A., & Tahir, M. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(5).
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nuraini, H., Larasati, E., Suwitri, S., & Nugraha, H. S. (2021). Pengembangan *Smart village* Sebagai Upaya Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 6(4).
- Pangaribowo, G. G. (2022). *Implementasi Kebijakan Desa Digital Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)*. Skripsi, Universitas Lampung.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2019). *RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024*.
- Premana, A., Sucipto, H., & Widianoro, A. (2022). Pengembangan Desa Berbasis *Smart village* (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Tegalreja). *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(1).
- Putra, D. W., & Radjikan. (2023). Peran Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4).
- Rakhman, R. N., Anugrah, F. A., Tias, I. R., Darmawan, L., Misbachussurur, Assyifa, N. R., Natasya, D., Zaskiya, E., Afifah, N., & Agustin, F. (2023). Pembangunan Desa Digital Sebagai Upaya Mengangkat Potensi Lokal Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang). *Prosiding Kampelmas (Kampus Peduli Masyarakat)*, 2(1).
- Roisatul, A., Burhan, S., Ardiansyah, M. F., & Fidanti, D. P. (2021). Pengembangan Desa Digital Sebagai Upaya Mengangkat Potensi Lokal Desa Karangrejo. *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat*, 2(2).

- Rusdianto, A. S., Sinatria, B. R., Anarki, B. G. R., Ramadhani, C. P. E., Pradana, D. A., Putri, D. R., Meilindasari, D. S., Siagian, L. L., Rizki, M. F., Hidayat, M. N., & Rahmadani, R. A. (2022). Digitalisasi Informasi Desa Bendelan Melalui Program Desa Digital Terintegrasi di Desa Bendelan Bondowoso. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(6).
- Sabri, S., & Ibrahim, I. (2024, June). Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasana Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Desa. In SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT (Vol. 3, pp. 328-335).
- Siagian:S. (2000). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3E
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet, Bandung
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulismadi, Wahyudi, & Muslimin. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. *Aristo*, 5(2).
- Susanto, E., Danu, J., Sandi, S., Bachri, S., Bagasasi, F., & Wilson, M. A. (2024). Strategi Inovatif Manajemen dan Bisnis di Era Digital: Analisis Pengambilan Keputusan Manajerial Dalam Konteks Lingkungan Bisnis yang Dinamis. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(4), 362-369.
- Syamsir, T. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik. (2024). Peran Komunikasi Pembangunan Dalam Mewujudkan *Smart village* Di Aceh. *International Journal Sadida: Islamic Communications & Media Studies*, 4(1).
- Trimurni, F., Sihombing, S. M., & Saraan, M. I. K. (2023). Monografi Desa dan Sustainability Pembangunan: Studi Kasus Pada Desa Swadaya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. *Journal Of Human And Education*, 3(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yanti, D. Y. (2024). Pelaksanaan *Smart village* Nusantara Dalam Perspektif Smart Governance di Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. *Journal of Political and Government Studies*, 13(2).